

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN
WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI DI
KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA
SULAWESI TENGGARA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Hukum Keluarga Islam
pada Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

WAHYUNI PRATIWI

NIM. 10100115062

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYUNI PRATIWI
Nim : 10100115062
Tempat/ Tgl. Lahir : Kolaka, 13 September 1997
Jur/Prodi/Konstentrasi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan
Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue
Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Adat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara.” adalah benar bahwa hasil karya penyusunan sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil karya ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu oleh orang lain, keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun) maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Makassar, 16 Januari 2019

Penyusun

Wahyuni Pratiwi

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI TENGGARA", yang disusun oleh Wahyuni Pratiwi, NIM: 10100115062 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 M, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1440 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam ilmu Syari'ah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Juli 2019 M
15 Dzulqaidah 1440 H

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Sekretaris : Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag.
Munaqisy I : Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M.Ag.
Munaqisy II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.
Pembimbing I : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Supardin, M.H.I.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIP. 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alāmin segala puji hanya kepada Allah Swt. terpanjatkan dariku dan semua makhluk yang berada dalam genggamannya, atas rahmat-Nya yang Dia taburkan pada hati, pikiran, dan jiwa serta pada setiap tapak langkah perjalanan hidup penyusun.

Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Nabiyyina Rasulullah *ṣallallāhu 'alaihi wasallam*, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya yang turut menyalakan api kebenaran Diin al-Islam.

Merupakan suatu kebahagiaan bagi penyusun, yang telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN PAKUE KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA”** sebagai salah satu persyaratan untuk dapat meraih gelar Strata-1 (S1) Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan harapan lain semoga kajian ini merupakan langkah awal dalam upaya membangkitkan sekaligus mengembangkan semangat berkreasi yang lebih kritis dan dinamis.

Selanjutnya penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dan dorongan yang tulus ikhlas dari semua pihak. Pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta wakil rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum dan para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. H. Supardin. M.H.I, selaku Ketua Jurusan Peradilan yang telah memberikan izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini serta banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan motivasi.
4. Dr. Hj. Patimah, M. Ag, selaku penasihat akademik yang telah memberikan masukan dan saran terhadap kelancaran kegiatan akademik, serta tak lupa peneliti menghaturkan terima kasih kepada Ibu Sri Hajati, S.H.I. selaku Staf Jurusan Peradilan.
5. Prof. Dr. Darussalam, M. Ag, dan Dr. H. Supardin, M.H.I, selaku Pembimbing I dan II yang dengan sabar telah banyak mengarahkan dan membimbing peneliti dalam perampungan penulisan skripsi sampai tahap penyelesaian.
6. Dr. H. Muh. Saleh Ridwan, M. Ag, selaku Penguji I dan Dr. Hj. Patimah, M. Ag selaku Penguji II yang telah banyak memberikan nasehat serta saran dalam perampungan skripsi.
7. Bapak dan ibu Dosen, beserta seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar yang sangat berjasa kepada penyusun selama kuliah di UIN Alauddin Makassar.
8. Seluruh Informan atas kesediannya memberikan informasi dan keterbukaan pengetahuannya. Semoga kebbaikannya dapat menjadi berkah bagi diri penulis dan dapat dibalas pula kebbaikannya oleh Allah Swt.
9. Secara khusus penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat dan tercinta yaitu Bapak dan Mamah yang telah banyak

memberikan dukungan dan pengorbanan serta tak hentinya mendoakan penyusun sehingga penyusun bisa menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tanpa hambatan yang besar.

10. Kedua adik tersayang Asma Dwi Putri dan Muhammad Nur Ikhsan Ramadhan sebagai motivasi terbesar penyusun untuk melewati segala rintangan yang ada termasuk segala rintangan dalam menyelesaikan skripsi ini serta selalu memberikan semangat dan do'a selama proses penyusun.
11. Sahabat terkasih sekaligus calon suami Muhammad Reza, ST, yang selalu memberikan do'a serta dukungan moril dan materil kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
12. Hj. Nuriah, Dg. Lebang dan keluarga yang sudah mengizinkan saya untuk tinggal di rumah beliau selama berkuliah di UIN Alauddin Makassar dan tak hentinya pula mendo'akan kesuksesan penulis.
13. Ibu Hj. Johareng selaku Camat Kecamatan Pakue yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta kepada para Tokoh adat suku Tolaki Kecamatan Pakue dan keluarga besar masyarakat Kecamatan Pakue yang telah bersedia menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian.
14. Keluarga besar FOSMADIM & INTEGRITY 2015, terkhusus teman seperjuangan yang masih menjadi teman selama menjadi santri di PONPES DDI AD MANGKOSO sejak 2009 hingga saat ini, yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih atas support dan banyolan yang tidak ada habis-habisnya.
15. Sahabat LAMBE SQUAD Saudari Nurfadhilah Saputri, Risdianti Septiaty, Fitri Handayani dan St. Adliyah Basir Terima kasih atas doa, dukungan moral dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini. Rekan-rekan seperjuangan

terkhusus Peradilan-B 2015 yang telah menemani dan memberikan dukungan dari awal masuk kuliah sampai akhir, tetap jaga tali silaturahmi kita.

16. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, dorongan dan do'anya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Akhirnya hanya kepada Allah Swt. kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya, serta semoga dapat bernilai pahala. Semoga Allah Swt. meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya, *āmiin yā rabbal 'alāmīn*.

Makassar, 23 Januari 2019

Peneliti

Wahyuni Pratiwi

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	12
A. Hukum Islam	12
1. Pengertian Hukum Islam	12
2. Sumber Hukum	13
B. Hukum Waris Adat	16
1. Pengertian Hukum Waris Adat	16
2. Pengaruh Adat terhadap Pembentukan Hukum	18
3. Sifat Hukum Waris Adat.....	20
4. Pengaruh-pengaruh Hukum Waris Adat	22
C. Hukum Waris Islam	22
1. Pengertian Hukum Waris Islam	22
2. Asas-asas Kewarisan Islam.....	24

3. Sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya.....	26
4. Ahli Waris dan Bagiannya	28
D. Suku Tolaki.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	41
1. Jenis Penelitian	41
2. Lokasi Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data.....	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder.....	43
D. Metode Pengumpulan Data.....	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
G. Pengujian Keabsahan Data	45
BAB IV SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT	
ADAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN PAKUE	
KABUPATEN KOLAKA UTARA SULAWESI	
TENGGERA	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
B. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki	
di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi	
Tenggara	51
1. Golongan ahli waris	52
2. Bagian masing-masing ahli waris	56
3. Cara dan waktu pelaksanaan warisan	60

4. Objek harta warisan	62
C. Sistem Pembagian Warisan secara Islam pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara	64
D. Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.....	69
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Implikasi Penelitian	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	a	a
إ	<i>kasrah</i>	i	i
أ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا...َ	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
ى	<i>Kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

4. *Tā' marbū'ah*

Transliterasi untuk *tā' marbū'ah* ada dua, yaitu: *tā' marbū'ah* yang hidup Ta'marbutah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah)

dilambangkan dengan huruf "t". ta'marbutah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudal al-at fal*

الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

نَجَّيْنَا : *najjainah*

6. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi huruf yang ada setelah kata sandang. Huruf "l" (ل) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang tersebut.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan pada Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu apabila hamzah terletak di

tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

1. Hamzah di awal

أُمِرْتُ : *umirtu*

2. Hamzah tengah

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

3. Hamzah akhir

شَيْءٌ : *syai'un*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa terpisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

Fil Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

اللَّهُمَّ دِينُ اللَّهِ *billah*

Adapun ta' marbutah di akhir kata yang di sandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

10. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital dipakai. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD. Di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal dan nama diri. Apabila nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandang.

Contoh: *Syahru ramadan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

Wa ma Muhammadun illa rasul

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
Saw.	= <i>sallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Wahyuni Pratiwi
NIM : 10100115062
**Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan
pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue
Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara**

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia.. Adapun yang menjadi pokok masalah penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.

Dalam penelitian ini, penulis membatasi kajian pada tulisan ini yaitu: *Pertama*, ahli waris serta bagiannya. *Kedua*, waktu pembagian warisan. Jenis yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research kualitatif deskriptif*) yaitu pencarian data dilakukan langsung di lokasi penelitian, dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan syar'i, legalitas formal, dan pendekatan sosiologis. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah dari waktu pelaksanaan warisan terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam. Dari segi ahli waris dan bagiannya, masyarakat adat suku Tolaki menjadikan anak adalah ahli waris utama. Walaupun demikian sistem pembagian warisan masyarakat adat suku Tolaki sebenarnya telah tertuang pada KHI pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau jalan damai. Pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan atau secara damai dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*.

Implikasi dari penelitian ini adalah: 1). Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki Kecamatan Pakue, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga, 2). Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara sistem pembagian warisan menurut adat dan menurut agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Manusia adalah makhluk yang menjunjung tinggi nilai kebudayaan dan nilai sosial di muka bumi ini. Budaya merupakan warisan sosial yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Akan tetapi kebudayaan hanya dapat diwariskan apabila dipelajari oleh pewarisnya.

Selain daripada itu Indonesia adalah salah satu negara yang kaya akan budaya dan adat, termasuk dalam hal pewarisan, Indonesia memiliki berbagai macam bentuk waris diantaranya, waris menurut hukum *Burgelijk Wetboek* (BW), hukum Islam dan hukum Adat.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.

Hukum waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹

Hukum waris itu: “.....memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang

¹Wikipedia, *Hukum Waris*, URL: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris, (10 Oktober 2018)

yang tidak bewujud benda (*immaterial goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses ini telah mulai waktu orangtua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi akut oleh sebab orangtua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.²

Di Indonesia terdapat tiga hukum waris yang digunakan yakni hukum adat dengan corak patrilineal, matrilineal dan parental, kedua hukum Islam yang mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah dan hukum waris *Burgerlijk Wetboek*.

Hukum Waris adat meliputi keseluruhan asas, norma dan keputusan/ketetapan yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (*materiil*) dan harta cita (*nonmateriil*) dari generasi satu kepada generasi berikutnya.³

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi sistem kekerabatan yang berlaku di daerah setempat.

Seperti halnya dalam kehidupan sosial budaya pada masyarakat suku Tolaki. Dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki dikenal adanya pembentukan

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) h. 259

³ Imam Sudiyat, "Peta Hukum Waris di Indonesia". Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional. (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), h.17, dalam Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006), h.1.

kerabat dari dua jalur, yakni jalur keturunan dan jalur perkawinan. Sistem kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁴

Hukum adat waris Tolaki atau biasa juga disebut dengan *sara ine petiara* adalah *saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali mombetado*, yakni ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orangtua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian.⁵

Dalam kehidupan rumah tangga orang Tolaki, salah satu kewajiban pokok orang tua (ayah dan ibu) sebelum meninggal adalah membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan hukum adat orang Tolaki.

Dahulu pembagian harta warisan terkadang dilakukan setelah orangtua telah meninggal dunia, namun cara seperti itu dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara ahli waris. Dalam perkembangannya, dimana orang Tolaki saat ini lebih cenderung mulai membagikan harta warisan tersebut selagi mereka masih hidup, sehingga anak-anak mereka mulai langsung secara mandiri memelihara/merawat harta atau barang warisan yang menjadi miliknya.

⁴ Pasal 171 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam

⁵ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 185.

Cara seperti itu, tentu saja akan mencegah terjadinya sengketa diantara ahli waris sepeninggal orangtua nantinya.

Sedangkan dalam Islam syarat terjadinya waris-mewarisi adalah karena adanya pewaris. Pewaris yang dimaksud adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan yang sebagiannya akan diwariskan kepada ahli waris.

Dalam kajian Islam, ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang dengan orang lain saling waris mewarisi, yaitu karena hubungan pertalian darah, karena ikatan perkawinan yang sah, dan karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris.⁶ Dari ketiga faktor dalam penentuan ahli waris tersebut, maka faktor kekerabatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang menjadi ahli waris.

Adapun penggolongan ahli waris pada suku Tolaki adalah anak/cucu merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka bagian ayah, ibu, kakek, nenek, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan harta warisan menjadi terhalang sepenuhnya, yaitu sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hubungannya dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, maka di kalangan masyarakat Tolaki tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat memperoleh warisan, melainkan anak zina (anak yang lahir diluar perkawinan), anak tiri dan anak angkat.⁷

⁶ Drs. H. M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.25

⁷ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 190.

Dalam hukum adat pewarisan suku Tolaki, tidak mengenal sistem pembagian kuantitatif seperti dalam hukum waris Islam, yakni $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Akan tetapi pewarisan adat suku Tolaki lebih dikenal sistem yang sifatnya kualitatif dengan melalui beberapa pola yang telah ditetapkan.

Berbeda halnya dengan hukum waris adat, hukum waris dalam Islam cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam hal pembagian warisan.

Sedangkan dalam hukum Islam dalam hal pewarisan tidak mengenal adanya pengelompokan harta tersebut. Hukum Islam hanya melihat satu satuan harta peninggalan, tanpa melihat darimana asalnya.

Kaitannya dengan penulisan skripsi ini, penulis mengambil praktek pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara yang jika dibandingkan dengan sistem pembagian warisan menurut hukum Islam sangatlah berbeda.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Meskipun demikian, corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau di daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu. Dalam menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya sumber tertinggi dalam hal ini adalah Al-Qur'an dan sebagai pelengkap yang menjabarkannya adalah sunnah Rasul beserta hasil-hasil ijtihad atau upaya ahli hukum Islam terkemuka.⁸

⁸ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1991), h. 9

Dari uraian di atas tampak jelas perbedaan terkait waktu pelaksanaan dan bagian ahli waris dalam sistem kewarisan Islam dengan sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara. Dalam hukum kewarisan Islam sebagaimana yang telah dijelaskan, waktu pembagian warisan dilaksanakan ketika salah satu si pewaris sudah meninggal.

Begitupun dalam hal pembagiannya, dalam Hukum kewarisan Islam sangat jelas disebutkan berapa bagian masing-masing yang didapatkan ahli waris tanpa dipengaruhi apakah ahli waris merupakan anak pertama, kedua, dan seterusnya tanpa membedakan antara anak kecil atau orang dewasa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

a. Fokus Penelitian

Judul penelitian ini adalah “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara”. Jadi dalam penelitian ini fokus pada sistem pembagian warisan pada masyarakat Suku Tolaki Di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Disertai dengan tinjauan hukum Islam dalam sistem pembagian warisan tersebut.

b. Deskripsi Fokus

- 1) Tinjauan hukum Islam adalah mempelajari dan memeriksa pandangan atau peraturan-peraturan yang bersumber dari wahyu yang diformulasikan kedalam lima produk pemikiran hukum yaitu;

fikih, fatwa ulama, keputusan pengadilan dan undang-undang, serta sosiologi hukum dalam mengatur kehidupan manusia.⁹

- 2) Sistem pembagian warisan adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan untuk meraih tujuan yang sama.¹⁰ Dalam proses, cara, membagikan warisan yang berasal dari bahasa arab *Al- mirats*, maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.
- 3) Masyarakat Suku Tolaki adalah kumpulan dari sejumlah orang dalam suatu tempat yang menunjukkan adanya pemilikan atas norma-norma hidup bersama walaupun di dalamnya terdapat golongan atau kelompok orang-orang yang keturunan dan merupakan etnis terbesar yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok masalah “Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara.” Sehubungan dengan pokok masalah tersebut maka submasalah yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian warisan adat pada masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara?

⁹ Dr. H. Supardin. M.H.I, *Materi Hukum Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h. 24.

¹⁰ Fredikurniawan, “Pengertian Sistem Secara Umum Dan Menurut Para Ahli”, *official website of Fredi Kurniawan*. <http://fredikurniawan.com/pengertian-sistem-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> (18 September 2018)

2. Bagaimana sistem pembagian warisan Islam pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara yang tidak sesuai dengan aturan kewarisan Islam?

D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian terdahulu merupakan bagian penting yang tak boleh hilang dalam susunan karya tulis ilmiah. Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan beberapa referensi berupa buku, artikel dan sejenisnya serta hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang tentunya berkaitan. Eksistensi dari kajian pustaka itu sendiri ialah memberi penegasan bahwa terdapat beberapa buku yang telah menjadi rujukan dan tentunya terkait dengan judul Penelitian Penulis saat ini yaitu: Tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun yang menjadi rujukan dalam penelitian ini diantaranya adalah:

Drs. H.M Anshary MK, S.H., M.H. dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik* membahas tentang materi hukum kewarisan Islam yang belum banyak disajikan, yaitu masalah pergeseran stelsel hukum kewarisan dari fiqh klasik ulama sunni ke fiqh kewarisan Indonesia Modern. Buku ini juga memberikan penjelasan lengkap mengenai bagian ahli

waris dan aturan mewarisi yang dimana materi ini merupakan materi pokok yang menjadi pegangan penulis dalam melakukan penelitian.

Selanjutnya adalah Skripsi Karya Muhammad Mirwan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris Dan Bagiannya)”. Skripsi ini membahas seputar waktu pelaksanaan pembagian warisan dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta berapa bagian masing-masing dari ahli waris yang terdapat di Desa Girisuko Yogyakarta. Muhammad Mirwan menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian waktu terbukanya warisan pada sistem kewarisan masyarakat Desa Girisuko terdapat tiga perbedaan yaitu Waktu kewarisan terbuka ketika pewaris masih hidup, waktu kewarisan terbuka ketika kedua orang tua (pewaris) meninggal dunia. Apabila salah satu orang tua masih hidup maka harta peninggalan pewaris (ayah atau ibu) belum bisa dibagikan. Dan waktu kewarisan terbuka ketika pewaris telah meninggal dunia (ayah tau ibu).¹¹ Dalam hal ini masih terdapat sistem yang tidak sejalan dengan hukum waris Islam.

Skripsi ini menjadi rujukan pertama penulis karena apa yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini sama dengan pokok masalah yang akan penulis teliti hanya saja yang menjadi perbedaan adalah tempat penelitian.

¹¹ Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)”, *skripsi* (Yogyakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013), h. 87.

Selanjutnya yang menjadi rujukan penulis adalah skripsi dari Mustari Haris yang berjudul “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”¹²

Selain buku dan Skripsi diatas tentunya masih banyak lagi literatur-literatur yang peneliti gunakan dalam penulisan ini.

Berdasarkan rujukan karya ilmiah diatas maka sejauh ini belum ada yang meneliti topik yang diangkat oleh penulis. Maka dari itu penelitian ini dipandang perlu untuk dilakukan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari pokok masalah di atas, maka tujuan dari penyusunan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui bagaimana suku Tolaki melakukan pembagian warisan dengan cara pembagian warisan Islam.
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hokum Islam terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

¹² Mustari Haris, “Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”, *Skripsi*, (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin 2016), h. 23

Adapun kegunaan diadakan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi dalam rangka memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia.
2. Dapat memberikan pengembangan alternatif bagi permasalahan-permasalahan kewarisan yang berkembang di masyarakat.
3. Sebagai bahan pertimbangan khususnya yang berkaitan dengan hukum kewarisan sehingga bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan kewarisan dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Hukum Islam*

1. *Pengertian Hukum Islam*

Di dalam Islam hukum yang berlaku ialah bersumber kepada agama Islam yang tentu saja berpedoman pada Al-Qur'an. Dalam hal ini berarti bahwa hukum Islam itu adalah suatu ketentuan atau ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh para sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli Islam melalui metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.¹³

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-Islam* atau dalam konteks tertentu dari *as-syariah al-Islamy*. Dalam wacana ahli Hukum barat istilah ini disebut dengan *islamic law*.

Ulama ushul berpendapat bahwa hukum Islam merupakan tata cara hidup mengenai doktrin syariat dengan perbuatan yang diperintahkan maupun yang dilarang. Pendapat tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan Ulama fikih

¹³Utsman Ali, "Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam", *Official Website Of Pengertian Pakar*. <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-Hukum-Islam.html#>, (22 September 2018)

yang mengatakan bahwa hukum Islam merupakan segala perbuatan yang harus dikerjakan menurut syariat Islam.¹⁴

2. *Sumber Hukum*

Pada umumnya terdapat dua pandangan mengenai sumber hukum, yakni: *Pertama*, inti yang sebenarnya ialah ketentuan yang dipaksakan kepada masyarakat oleh sesuatu kekuasaan; *Kedua*, hukum timbul dari dalam masyarakat sendiri.¹⁵

Semua hukum perbuatan dalam Islam selalu merujuk kepada empat macam rujukan yang disepakati oleh mayoritas kaum muslimin yaitu: Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Apabila dihadapkan pada suatu kasus, yang pertama menjadi rujukan adalah Al-Qur'an. Jika hukumnya terdapat didalamnya maka hukum tersebut yang dilaksanakan dan apabila tidak ditemukan didalam Al-Qur'an maka yang menjadi rujukan selanjutnya adalah sunnah dan apabila Hukumnya tidak terdapat didalam sunnah maka kita melihat apakah terdapat ijmak dari pada mujtahid yang hidup satu zaman dan jika didalam ijmak juga tidak terdapat Hukumnya maka dilakukan ijtihad menggunakan metode *qiyash* terhadap *nash* (Al-Quran dan sunnah).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam itu mencakup sesuatu yang bersifat kemanusiaan dan yang bersifat ketuhanan.

¹⁴ Tesis Hukum, "Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli", *Situs Resmi Tesis Hukum*. <https://tesisHukum.com/pengertian-Hukum-Islam-menurut-para-ahli/> (23 September 2018).

¹⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta:PT. Midas Surya Grafindo,1987), h.91

Selain empat sumber hukum tersebut di atas sebagai sumber-sumber utama, menurut Dr. S. Ramadhan masih ada lagi sumber-sumber tambahan, yakni:

- 1) *Al istihsan*, yakni kemungkinan menyimpang mengenai suatu masalah tertentu dari ketentuan yang baru, karena pertimbangan-pertimbangan Hukum yang memerlukan penyimpangan-penyimpangan demikian itu.
- 2) *Al istishlah*, yakni keputusan-keputusan yang diambil atas dasar kepentingan umum yang belum pernah terjadi dan tidak pula terdapat dalam al-Qur'an dan al-sunnah secara tegas.
- 3) *Al'urf*, yakni adat atau kebiasaan dari sesuatu masyarakat, baik yang lisaniyah maupun yang 'amaliyah.¹⁶

Berbicara masalah hukum Islam ada dua istilah yang dapat dipadankan dengan istilah ini yaitu syariah dan fikih. Istilah ini merupakan dua istilah yang berbeda tetapi tidak bisa dipisahkan, karena keduanya sangat terkait erat.

Dalam ilmu fikih terdapat istilah *Al-qaw'aid al-khamsah* yang artinya 5 kaidah, sesuai dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan kaidah yang menghubungkan ketentuan dalam hukum kewarisan Islam dan adat yang tidak bisa terlepas dari kaidah-kaidah *ushul*. Kaidah yang dimaksudkan adalah kaidah *Al'aadatu Muhakkamah* yang artinya adalah adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai dasar hukum.

¹⁶ Dr. Said Ramadhan, *Islamic Law*, (London: P.R. Mac Millian Limited, 1961), h.23

Para ulama yang mengamalkan '*urf*' atau adat dalam memahami dan mengistinbathkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk '*urf*' atau adat tersebut yaitu:

1. Adat atau '*urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat
2. Adat atau '*urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikalangan sebagian besar warganya
3. Adat atau '*urf*' dijadikan sandara dalam penetapan Hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan adat atau '*urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti adat atau '*urf*' itu harus telah ada sebelum penetapan hukum
4. Adat atau '*urf*' tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.¹⁷

'*Urf*' adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan.¹⁸ Sedangkan menurut istilah para ahli syara' tidak ada perbedaan antara '*urf*' dan adat kebiasaan. Jadi unsur pembentukan '*urf*' adalah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.400-402

¹⁸ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Dina Utami Semarang, 1994), h. 123.

menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.¹⁹

B. Hukum Waris Adat

Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat adalah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan dengan penuh wibawa yang dalam pelaksanaannya diterapkan begitu saja, artinya tanpa adanya keseluruhan peraturan yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat sama sekali. Begitupun dengan Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, mengemukakan bahwa “Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi (*ongecodiceerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*), mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgelovg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adat recht*).

Dengan demikian, hukum adat itu merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.²⁰

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat atau ada yang menyebutnya dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan),

¹⁹ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991), h. 89.

²⁰ Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M.Hum, *Hukum Adat Dahulu, kini, Dan Akan Datang*, Cet.II, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 4

waris (ahli waris dan bukan ahli waris) serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat adalah salah satu aspek hukum dalam lingkup permasalahan hukum Adat yang meliputi norma-norma yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun immaterial, yang mana dari seorang tertentu dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari harta yang dimaksud. Istilah “Hukum waris adat” dimaksudkan untuk membedakannya dengan istilah hukum waris Islam, hukum waris nasional, hukum waris Indonesia dan istilah hukum waris lainnya.

Istilah tentang hukum waris adat ini tidak terikat kepada asal kata “waris” yang berasal dari bahasa Arab ataupun hukum waris Islam. Pembicaraan mengenai hukum waris adat berarti kita bicara sekitar hukum waris Indonesia yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang di sana-sini tidak terlepas dari pengaruh unsur-unsur ajaran agama dan hukum adat waris yang secara turun temurun dari zaman purba.

Hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan hukum yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiil dan non materiil dari generasi ke generasi.

Hukum waris adat adalah hukum waris yang diyakini dan dijalankan oleh suku tertentu di Indonesia. Beberapa hukum waris adat aturannya tidak tertulis, namun sangat dipatuhi oleh masyarakat pada suku tertentu dalam suatu daerah, dan bila ada yang melanggarnya akan diberikan sanksi.

Jenis Hukum ini banyak dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan serta struktur kemasyarakatannya. Selain itu jenis pewarisannya pun juga beragam, antara lain :

1. Sistem Keturunan, pada sistem ini dibedakan menjadi tiga macam yaitu garis keturunan bapak, garis keturunan ibu, serta garis keturunan keduanya
2. Sistem Individual, merupakan jenis pembagian warisan berdasarkan bagiannya masing-masing, umumnya banyak diterapkan pada masyarakat suku Jawa.
3. Sistem Kolektif, merupakan sistem pembagian warisan dimana kepemilikannya masing-masing ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau tidak menerima warisan. Umumnya bentuk warisan yang digunakan dengan jenis ini adalah barang pusaka pada masyarakat tertentu.
4. Sistem Mayorat, merupakan sistem pembagian warisan yang diberikan kepada anak tertua yang bertugas memimpin keluarga. Contohnya pada masyarakat Lampung dan Bali.

2. *Pengaruh Adat Terhadap Pembentukan Hukum*

Di Indonesia terdapat jenis hukum yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan suatu golongan masyarakat yang selalu berulang sehingga dianggap sebagai sebuah adat. Adat sendiri berasal dari bahasa arab yaitu '*adah*' yang artinya berulang atau kembali lagi. Adat dan hukum itu sendiri sudah menjadi satu kesatuan yang merupakan suatu istilah hukum Indonesia yang menunjukkan

tentang kebiasaan, baik tentang bidang kesusilaan, maupun bidang-bidang lainnya dari suatu golongan tertentu yang juga dapat dipersamakan dengan pengertian '*urf*' dalam istilah hukum fikih.

Semua tingkah laku atau tindakan yang dilakukan oleh suatu golongan yang dianggap baik dan bermanfaat bagi mereka akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan yang nantinya akan lahir sebuah norma dalam golongan tersebut yang lambat laun akan menjadi sebuah norma hukum.

Dalam hal ini, sesuatu dikatakan menjadi norma hukum bukanlah karena suatu penetapan melainkan sebuah kebiasaan yang selalu diulang-ulang mengerjakannya, oleh karena itu jika dilihat dari sumbernya, norma ini tidak berasal dari seorang penguasa melainkan berasal dari masyarakat itu sendiri.

Dan karena masyarakat pada dirinya sendiri mengandung kecenderungan untuk berubah-ubah, maka hukum adat atau '*urf*' adalah hukum yang senantiasa berubah-ubah. Ia hidup dan tumbuh sejalan dengan kehidupan dan pertumbuhan masyarakatnya sendiri. Kalau ia tidak lagi sejalan dengan pertumbuhan masyarakatnya, iapun dengan sendirinya menjadi mati dan tumbuhlah adat yang baru yang sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakatnya.²¹

Oleh karena pertumbuhan hukum adat selalu berubah-ubah itu menjadikannya sebagai sebuah hukum yang tidak tertulis. Walaupun demikian

²¹ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, (Jakarta:PT. Midas Surya Grafindo,1987), h.132-133

para ahli hukum Islam berpendapat bahwa adat adalah suatu unsur penting dalam menetapkan suatu hukum.

Seperti halnya pada pokok penelitian ini dimana adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang pada masyarakat suku Tolaki dalam hal kewarisan dianggap sangat berbeda oleh peneliti dengan pembagian warisan dalam Islam. Oleh karena sistem pembagian warisan tersebut telah dilakukan sejak dahulu dan selalu berulang dan dianggap baik bagi masyarakat suku tersebut maka lahirlah sebuah hukum adat kewarisan yang berbeda dengan apa yang telah ditetapkan didalam Islam.

Pengaruh adat dalam kehidupan sehari-hari bukan lagi hal yang perlu diragukan, yang terpenting adalah bagaimana kita dapat menjadikan adat itu sebagai sesuatu yang baik dan sesuai perkembangan zaman atau lebih tepatnya adalah sesuai dengan syariat Islam.

3. *Sifat Hukum Waris Adat*

Jika hukum waris adat kita bandingkan dengan hukum waris perdata dengan hukum waris Islam, maka dapat terlihat perbedaannya dalam harta warisan dan cara pembagiannya.

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang tidak dapat ternilai, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya.

Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris perdata.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para ahli waris, tidak dapat dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan pasal 1066 KUHPerdara alinea pertama yang berbunyi : “Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta waris adat yang tidak terbagi dapat digadai jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tetua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dijual oleh para ahli waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetanggaan (*naastingsrecht*) dalam lingkungan kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal asas “*legitime portie*” atau bagian yang mutlak sebagaimana hukum waris Perdata dimana untuk para ahli waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagikan kepada para ahli waris. Akan tetapi jika para ahli waris memiliki kebutuhan dan kepentingan, sedangkan dia berhak mendapat warisan, maka bisa saja ahli waris mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan hartawarisan dengan cara bermusyawarah mufakat dengan para ahli waris lainnya.

4. Pengaruh-Pengaruh Hukum Waris Adat

Aturan-aturan hukum waris mengalami pengaruh :

- a. Perubahan/ perkembangan sosial
- b. Karena makin eratnya ikatan keluarga, sejalan dengan melonggarkannya ikatan suku
- c. Aturan-aturan pewarisan dari stelsel-stelsel hukum asing karena hubungan tertentu dengan agama mendapat kewibawaan yang berasal dari religi; atauran-aturan itu misalnya oleh hakim-hakim agama diterapkan atas peristiwa-peristiwa konkrit, meskipun pengaruh itu di dalam hukum waris lebih kecil daripada hukum perkawinan; tergantung kepada kekuatan hukum waris struktural apakah hukum tersebut dapat bertahan ataukah akan terjadi perubahan yang mendalam.

C. Hukum Waris Dalam Islam

1. Pengertian Hukum Waris dalam Islam

Warisan berasal dari bahasa arab *Al-miirats*, maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain, atau dari suatu kaum kepada kaum lain.²² Berbicara masalah waris sama halnya dengan berbicara masalah berpindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada seorang ahli waris yang telah ditentukan. Selain warisan adapula istilah lain yang biasa disebut dengan *faraidh* yang berarti bagian-bagian yang dibagi kepada semua orang yang berhak menerimanya menurut ketentuan agama Islam.

²² Ash-Shabuni. Muhammad Ali, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

Hukum waris Islam hanya berlaku pada masyarakat yang memeluk agama Islam, dimana sistem pembagian warisannya menggunakan prinsip individual bilateral. Jadi dapat dikatakan ahli waris harus berasal dari garis ayah atau ibu.

Selain itu makna warisan adalah jika harta atau aset yang diberikan orang yang memberikan sudah meninggal dunia, jika orangnya masih hidup istilahnya disebut Hibah bukan warisan. Hal yang terpenting juga adalah orang yang menjadi ahli waris harus yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan keturunan.

Berdasarkan definisi diatas, terdapat tiga aspek yang terdapat didalam hukum kewarisan, yaitu mengenai siapa saja yang termasuk ahli waris, kemudian menyangkut masalah bagian perolehan masing-masing ahli waris, serta pemindahan hak milik harta warisan sang pewaris. Ada tiga unsur yang berkaitan dengan warisan, yaitu:

1. Seorang peninggal warisan (*erflater*), yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*erfgenaam*), yang berhak menerima kekayaan yang ditinggal itu.
3. Harta kekayaan atau warisan (*nalatenschap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih pada para ahli warisnya.

2. *Asas-asas Kewarisan Islam*

1. Asas Ketauhidan

Asas ketauhidan atau prinsip ketuhanan merupakan asas pertama dalam kewarisan Islam. Prinsip ketauhidan dalam kewarisan berbicara mengenai tekad keimanan seorang muslim yang tergambar dalam pandangannya yang prinsipal tentang wujud Allah yang dituangkan dalam titik tolak di bawah ini:²³

- 1) Hukum warisan Islam adalah hukum Allah yang ditetapkan untuk menggantikan hukum waris kaum jahiliyah yang sesat dan menyesatkan.
- 2) Hukum kewarisan adalah hukum Allah paling sempurna dalam mengatur pembagian harta waris menurut ketentuan yang berlaku.
- 3) Hukum kewarisan Islam secara tekstual tertuang dalam Al-Qur'an dan as-sunnah dengan ayat-ayat yang sempurna, jelas, dan akurat (*qath'i dalalah*).
- 4) Ayat-ayat tentang hukum waris Islam adalah ayat-ayat *muhkamah*.
- 5) Pengamalan hukum waris Islam harus didasarkan pada keimanan kepada Allah dan semua tuntunannya.
- 6) Ketaatan kepada Allah dimanifestasikan dengan melaksanakan ayat-ayat tentang waris.
- 7) Mengamalkan sunnah Rasulullah Saw. sebagai bentuk ketaatan kepadanya.
- 8) Prinsip ketauhidan berakar dari tujuh pandangan diatas.

²³ Drs. Beni Ahmad Saebani. M.Si. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), h.31

Prinsip ketauhidan dalam sistem kewarisan Islam adalah *al-ruju' ila al-Qur'an wa As-Sunnah*. Menurut Juhaya S. Pradja (2000: 56), prinsip tersebut dibangun atas dasar kebenaran-kebenaran yang bersifat otoritatif atau *an-naqliyah wa al-mutawatirah*, yakni dari para pemegang otoritas dibidangnya masing-masing. Prinsip tersebut akan berhubungan langsung dengan prinsip lainnya, yakni penyesuaian antara akal dengan wahyu *muwafaqah al-shahih al-manqullishahih al-ma'qul* sehingga ketentuan-ketentuan kewarisan Islam tidak ada yang irasional, justru telah membuka kebudayaan yang modern dan aplikatif di segala situasi dan kondisi.

2. Asas Keadilan (*Al-'Adl, Al-Mizan, Al-Qisth*)

Keadilan adalah seimbangnya antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris seorang laki-laki diberikan secara proporsional begitupula dengan hak waris seorang perempuan. Itulah mengapa makna keadilan yang dimaksud dalam kewarisan Islam adalah adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang sesuai dengan hak dan kewajiban seorfang ahli waris bukan keadilan dalam arti sama rata.

3. Asas Bilateral dalam Waris Islam

Ada tiga sistem kekeluargaan yang pada umumnya digunakan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan faktor genetiknya masing-masing. Sistem kekeluargaan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Patrilineal, yaitu suatu sistem kekeluargaan yang ditarik dari garis bapak. Ini berlaku bagi keluarga yang mengikatkan keturunan kepada bapaknya, dan tidak berlaku jika dikaitkan kepada ibu.
- 2) Sistem Matrilineal, yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan langsung dari ibu. Keadaannya berbeda dengan sistem patrilineal.
- 3) Sistem Parental, yaitu menarik ikatan keturunan dari dua garis yakni dari bapak dan ibu.²⁴

3. *Sebab-sebab Hubungan Kewarisan dan Penghalangnya*

Dalam kajian fiqh Islam, ada beberapa hal yang menyebabkann seseorang dengan orang orang lain saling waris mewarisi, yaitu :

1. Karena hubungan pertalian darah.
2. Pernikahan, karena ikatan perkawinan yang sah.
3. Karena kesamaan iman pewaris dan ahli waris.

Adapun sebab-sebab yang menghalangi terjadinya kewarisan

1. Hamba sahaya (*al-riq*) *Al-riq* secara etimologis adalah *al'-ubudiyah* artinya penghambaan. *Alriq* dalam terminologi ulama fikih adalah kelemahan secara hukmi yang ada pada diri manusia disebabkan kekafiran. Pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang disifatkan pada seorang hamba. Dia tidak dapat memiliki sesuatu, bahkan dia dimiliki dan diatur oleh tuannya.

²⁴ Drs. Beni Ahmad Saebani. M.Si. *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia), h. 52

2. Pembunuhan, pembunuhan yang dimaksud adalah apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Akan tetapi dalam hal ini para Imam Mazhab berbeda pendapat, yakni mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli waris akan terhalang untuk mendapatkan warisan apabila telah membunuh pewaris dengan cara apapun. Kemudian mazhab Maliki mengatakan bahwa jenis pembunuhan yang dapat menggugurkan hak mewarisi adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja oleh ahli waris. Sedangkan menurut mazhab Hanbali, semua jenis pembunuhan yang dilakukan ahli waris yang tidak diancam dengan hukuman seperti *qishash*, *dhiyat*, atau *kafarah*, tidak akan menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan warisan dari si pewaris.
3. Perbedaan agama. Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbali sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima warisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami istri).

Pada dasarnya persoalan waris-mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas *ijbari*, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya

menurut ketetapan Allah SWT. tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.²⁵

4. *Ahli waris dan Bagiannya*

Permasalahan yang menyangkut warisan sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an atau sunnah seperti halnya dengan masalah-masalah lain yang dihadapi manusia dengan keterangan yang konkret, sehingga tidak akan timbul bermacam-macam interpretasi dan konflik di kalangan ulama dan umat Islam. Seperti halnya kedudukan suami istri, bapak, ibu, anak (laki-laki atau perempuan) sebagai ahli waris yang tidak bisa tertutup oleh ahli waris lainnya dan juga hak bagiannya masing-masing.

Ada beberapa jenis penggolongan ahli waris diantaranya:²⁶

1. Sistem penggolongan ahli waris menurut fikhi mawaris
2. Sistem penggolongan ahli waris menurut hukum kewarisan Islam
3. Sistem penggolongan ahli waris menurut KUHPerdara.

Dalam sistem kewarisan Islam ahli waris dapat digolongkan dalam 3 bentuk, yaitu :

1. *Dzawil Furudh* adalah ahli waris yang saham atau bagiannya sudah ditentukan secara pasti, dan bagiannya tersebut telah ditegaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis Rasul Saw.

²⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h.129

²⁶ DR. Supardin, M.H.I, *Fikhi Mawaris & Hukum Kewarisan(Studi Analisis Perbandingan)*, (Makassar: Alauddin University Press, 2017), h.25-57

2. *Ashabah* adalah ahli waris yang saham atau bagiannya tidak ditentukan secara pasti di dalam *nash* Al-Qur'an maupun hadis, tetapi ia menghabiskan sisa harta setelah dikeluarkan bagian *dzawil furudh*.
3. *Dzawil Arham* adalah orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat dengan pewaris, tetapi tidak masuk pada 2 golongan diatas yakni *dzawil furudh* dan *ashabah*.

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara eksplisit.²⁷ Di dalam nas telah disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Al-qur'an dikenal dengan istilah furud itu adalah bentuk pecahan yaitu yakni $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$.

Begitupun dalam hal pembagian harta warisan, di dalam Islam tidak ada anjuran mutlak terhadap waktu pelaksanaan pembagian harta warisan untuk disegerakan juga tidak ada keterangan yang sama kuat untuk menunda-nunda waktu pembagian harta warisan ketika si pewaris sudah meninggal dunia. Hanya saja Islam menganjurkan, apabila dikhawatirkan terjadi berbagai konflik internal

²⁷ Muhammad Mirwan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)", *skripsi* (Yogyakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013), h. 66

dalam keluarga, maka dianjurkan untuk segera melakukan pembagian harta warisan tersebut.²⁸

Akan tetapi pada dasarnya hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama warisan selama yang mempunyai warisan masih hidup.²⁹

Secara filosofis, pewarisan mengisyaratkan bahwa masa kepemilikan harta bagi manusia ada batasnya. Berakhirnya batas kepemilikan harta, tentunya akan berimplikasi pada perpindahan yang legal. Pola ini diharap memberikan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, secara mendasar Al-Qur'an memberikan aturan global akan masalah ini dalam QS. Al-Nisa (4) : 7 yang lengkapnya sebagai berikut;

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Adapun didalam hukum waris Islam terkait dengan perincian bagian setiap ahli waris dan persyaratannya adalah sebagai berikut:

²⁸ Muhammad Mirwan, h. 67

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 28

- Bagian Anak Laki-laki :

1. Mendapat ashabah, semua dia waris, tidak ada ahli waris yang lain.
2. Mendapat ashabah dan dibagi sama, bila jumlah mereka dua dan seterusnya, dan tidak ada ahli waris lain.
3. Mendapat ashabah atau makanan, jika ada ahli waris lainnya.
4. Jika anak-anak si terdiri dari laki-laki dan perempuan maka anak laki-laki mendapat dua bagian, dan anak perempuan satu bagian. Misalnya, si mati meninggalkan 5 anak perempuan dan 2 anak laki-laki, maka harta waris dibagi 9. Setiap anak perempuan mendapat 1 bagian, dan anak laki-laki mendapat 2 bagian.

- Bagian Ayah :

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika si mayit memiliki anak laki-laki atau cucu laki. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan ayah, maka harta dibagi menjadi 6, Ayah mendapat $\frac{1}{6}$ dari 6 yaitu 1, puas untuk anak.
2. Mendapat ashabah, bila tidak ada anak laki-laki atau cucu laki. Misalnya si mati ayah dan suami, maka suami mendapat $\frac{1}{2}$ dari peninggalan isterinya, bapak ashabah (sis).).
3. Mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah, jika hanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati ayah dan satu anak

perempuan. Maka satu anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ plus ashabah.

Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, dan semua saudara sekandung atau seapak atau seibu gugur, karena ada ayah dan datuk.

- Bagian Kakek:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki, dan tidak ada bapak. Misalnya si mati meninggalkan anak laki-laki dan kakek. Maka kakek mendapat $\frac{1}{6}$, sisanya untuk anak laki-laki.
2. Mendapat ashabah, jika tidak ada ahli waris selain dia.
3. Mendapat ashabah setelah diambil ahli waris lain, jika tidak ada anak laki-laki, cucu laki-laki dan bapak, dan tidak ada ahli waris wanita. Misalnya si mati tinggalkan datuk dan suami. Maka suami mendapatkan $\frac{1}{2}$, lebihnya untuk datuk. Harta dibagi menjadi 2, suami sama dengan 1, datuk sama dengan 1.
4. Kakek mendapat $\frac{1}{6}$ dan ashabah, bila ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya si mati meninggalkan kakek dan seorang anak perempuan. Maka anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$, kakek mendapat $\frac{1}{6}$ ditambah ashabah (sisanya).

Bagian kakek sama seperti bagian ayah, kecuali bila selain ayah ada isteri atau suami dan ibu, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta waris, bukan sepertiga dari sisa setelah suami atau isteri mengambil bagiannya.

- Bagian Suami:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki.
2. Mendapat $\frac{1}{4}$, bila meninggalkan anak atau cucu. Misalnya, isteri mati meninggalkan 1 laki-laki, 1 perempuan dan suami. Maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta, beristirahat untuk 2 orang anak, yaitu bagian laki-laki 2 kali bagian anak perempuan.

- Bagian Anak Perempuan:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$ jika dia adalah seorang diri dan tidak ada anak laki-laki
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika dapat memilih dua atau lebih dan tidak ada anak laki-laki.
3. Mendapat menerima, jika bersama anak laki-laki. Putri 1 bagian dan, putra 2 bagian.

- Bagian Cucu Perempuan Dari Anak Laki-Laki:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika dia pergi, tidak ada saudaranya, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.

2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika memungkinkan dua atau lebih, jika tidak ada cucu laki-laki, tidak ada anak laki-laki atau anak perempuan.
 3. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika ada satu anak perempuan, tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki .
 4. Mendapat ashabah bersama cucu laki-laki, jika tidak ada anak laki-laki. Cucu laki-laki mendapat 2, wanita 1 bagian. Misalnya si mati meninggalkan 3 cucu laki-laki dan 4 cucu perempuan. Maka harta dibagi menjadi 10 bagian. Cucu laki-laki masing-masing mendapat 2 bagian, dan setiap cucu perempuan mendapat 1 bagian.
- Bagian Isteri:
 1. Mendapat $\frac{1}{4}$, jika tidak ada anak atau cucu
 2. Mendapat $\frac{1}{8}$, bila ada anak atau cucu
 3. Bagian $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ dibagi rata, jika perlu
 - Bagian Ibu:
 1. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika ada anak dan cucu.
 2. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika ada saudara atau saudari.
 3. Mendapat $\frac{1}{3}$, jika hanya dia dan bapak.
 4. Mendapat $\frac{1}{3}$, dari menerima setelah menerima mengambil bagiannya , jika bersama ibu dan ahli waris lain yaitu bapak dan suami. Maka

suami mendapat $\frac{1}{2}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

5. Mendapat $\frac{1}{3}$, setelah diambil bagian isteri, jika bersama ibu ada ahli waris lain yaitu bapak dan isteri. Maka isteri mendapat $\frac{1}{4}$, ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dari sisa, bapak mendapatkan ashabah (sisa).

- Bagian Nenek:

Nenek yang mendapat warisan sebagai ibu, ayah.

1. Tidak mendapat warisan, jika si mati meninggalkan ibu, dikirim kakek tidak mendapatkan warisan jika ada ayah.
2. Mendapat $\frac{1}{6}$, seorang diri atau lebih, jika tidak ada ibu.

- Bagian Saudari Sekandung:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika berlayar, tidak ada saudara sekandung, bapak, kakek, anak.
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika memilih dua atau lebih, tidak ada saudara sekandung, anak, bapak, kakek.
3. Mendapat bagian ashabah, bila bersama saudaranya, bila tidak ada anak laki-laki, bapak. Yang laki-laki mendapat dua bagian, perempuan satu bagian.

- Bagian Saudari Sebapak:

1. Mendapat $\frac{1}{2}$, jika berlayar, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada saudara sebapak, saudara atau saudara sekandung
2. Mendapat $\frac{2}{3}$, jika dua ke atas, tidak ada bapak, kakek, anak dan tidak ada Saudara sebapak, saudara atau saudara sekandung.
3. Mendapat $\frac{1}{6}$, baik sementara atau banyak, jika ada satu saudara sekandung, tidak ada anak, cucu, bapak, kakek, tidak ada saudara sekandung dan sebapak.
4. Mendapat ashabah, jika ada saudara sebapak. Saudara sebapak mendapat dua bagian, dan dia satu bagian.

- Bagian Saudara Seibu:

Saudara seibu atau saudari seibu sama bagiannya:

1. Mendapat $\frac{1}{6}$, jika sendirian, jika tidak ada anak cucu, bapak, kakek.
2. Mendapat $\frac{1}{3}$, jika dua ke atas, baik laki-laki atau perempuan sama saja, jika tidak ada anak, cucu, bapak, kakek.³⁰

Berbeda halnya dengan hukum waris adat, hukum waris dalam Islam cenderung menggunakan metode kuantitatif dalam hal pembagian warisan.

³⁰ <https://almanhaj.or.id/2023-perincian-pembagian-harta-waris.html>

Sehubungan dengan permasalahan kewarisan diatas, Al-Qur'an dan Sunnah telah memberikan aturan Hukum yang tegas dan angat terperinci. Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.³¹ Meskipun demikian beberapa hal masih perlu adanya ijtihad, oleh karena itu corak kehidupan pada suatu negara atau daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam. Walaupun pengaruhnya itu dipandang relevan, sejauh tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum waris Islam baku.³²

D. Suku Tolaki

Suku Tolaki adalah Suku yang mendiami nusantara yaitu letaknya di Sulawesi Tenggara, dimana di Sulawesi Tenggara terdapat 4 suku yaitu Muna, Buton, Tolaki dan Wolio. Suku Tolaki mendiami daerah yang berada di sekitar Kabupaten Kendari dan Konawe. Suku Tolaki berasal dari kerajaan Konawe.

Masyarakat Tolaki umumnya merupakan peladang dan petani yang handal, hidup dari hasil ladang dan persawahan yang dibuat secara gotong-royong keluarga. Raja Konawe yang terkenal adalah Haluoleo (delapan hari).

Masyarakat Kendari percaya bahwa garis keturunan mereka berasal dari daerah Yunani Selatan yang sudah berasimilasi dengan penduduk setempat. Keberadaan Suku Tolaki berdasarkan sejarah, tidak dapat dipisahkan dari

³¹ Idris Jakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, (Jambi: Pustaka Jaya, 1995), h. 29

³² Sajuti Thalib, *Peran Peradilan Agama Dalam Pelaksanaan Syari'at Islam*, h.74

Kalo/Kalo Sara sebagai benda yang disakralkan oleh masyarakat hukum adat suku Tolaki.

Ada berbagai macam upacara adat di dalam Suku Tolaki salah satunya adalah upacara dalam proses pernikahan di mana yang menjadi simbol utama dalam Prosesi perkawinan adat Tolaki adalah *Kalosara*. *Kalo/Kalosara* adalah lambang pemersatu dan perdamaian yang sangat sakral dalam kehidupan Suku Tolaki dan selalu digunakan dalam upacara adat apapun dalam Suku Tolaki.

Kalo/Kalo Sara secara fisik merupakan rotan yang berbentuk lingkaran, rotan tersebut dililitkan sebanyak tiga lilitan, dan salah satu ujung dari rotan yang dililitkan disimpul dan diikat, sehingga ujung rotan tersembunyi di dalam simpul. Rotan dililitkan memutar searah jarum jam, dan salah satu yang lain dari ujung rotan dibiarkan mencuat keluar tanpa diikat dan disembunyikan dalam simpul yang memiliki makna bahwa jika dalam menjalankan adat terdapat berbagai kekurangan, maka kekurangan itu tidak boleh diberkan kepada umum atau orang banyak, sehingga pada Suku Tolaki terdapat kata-kata bijak: *kenota kaduki osara mokongga'du'i toono meohai mokonggoa'i, pamarenda mokombono'i*.

Arti dari kata-kata bijak tersebut adalah bila dalam menjalankan sesuatu adat terdapat kekurangan, maka adat, para kerabat, dan pemerintahlah yang akan mencukupkan semua itu atau dapat pula dimaknai kekurangan apapun yang terjadi dalam suatu proses adat, maka hal itu harus dapat diterima sebagai bagian dari adat Suku Tolaki.

KaloSara sebagai simbol dan induk dari adat Suku Tolaki/*sara owose/Sara Mbuuno Tolaki*, Juga melahirkan beberapa adat yang terbagi dalam beberapa golongan aspek kehidupan, yakni sebagai berikut:

1. *Sara Wanua/Sara Mombulesako*: Adat yang berlaku secara intern, maupun ekstern yakni berkaitan dengan hak dan kewajiban serta fungsi, peran dan tugas Pemerintah terhadap rakyat, hubungan antara Pemerintah dan Negeri Suku Tolaki, serta hubungan antara rakyat dan rakyat.
2. *Sara Mbedulu*: Adat jenis ini mengatur tentang hubungan kekeluargaan dan persatuan, mengatur tentang hubungan antar anggota keluarga inti sebagai satuan masyarakat terkecil, hingga mengatur tentang hubungan antar golongan baik bangsawan dan non bangsawan. Termasuk sub dari adat jenis ini adalah *sara mberapu*, yakni adat yang secara khusus mengatur tentang perkawinan.
3. *Sara Mbe'omb*: Adat jenis ini merupakan adat yang mengatur tentang pelaksanaan aktivitas keagamaan atau kepercayaan, juga termasuk di dalamnya *mombado*,
4. *Sara Mandarahia*: Adalah adat yang mengatur tentang pekerjaan yang membutuhkan sebuah keahlian dan/atau keterampilan.
5. *Sara Mbeotoro'a*: Adalah adat yang dalam kegiatan berladang (*mondau*), berkebun (*mombopaho*), berternak/megembala kerbau (*mombakani*), berburu (*melabu* dan *dumahu*), dan menangkap ikan (*meoti-oti*). Oleh karena itu, *kalosara* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari orang Tolaki.

Kalosara sebagai simbol persatuan kesatuan dan simbol Hukum adat yang selalu hadir dalam berbagai peristiwa penting dalam kehidupan orang tolaki.

Misalnya dalam penyelesaian berbagai konflik/sengketa baik dalam skala besar(misalnya sengketa yang melibatkan kampung dengan kampung) maupun dalam skala kecil (misalnya sengketa yang melibatkan individu), dalam pengurusan perkawinan, dalam menyambut tamu, dalam menyampaikan undangan lisan, menyampaikan berita duka dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Oleh karena itu proses pelaksanaannya tidak dapat dihidirkan oleh orang-orang biasa dalam masyarakat.

Di dalam masyarakat suku Tolaki terdapat tokoh adat yang disebut sebagai *Tolea* dan *Pabitara*. *Tolea* dan *Pabitara* ini merupakan juru penerang adat yang tugasnya adalah menyampaikan suatu pemberitahuan kepada orang banyak.

Mereka adalah tokoh adat yang diangkat sebagai tokoh karena kepandaiannya dalam menjelaskan sesuatu serta dianggap mampu berbicara dalam berbagai urusan-urusan penting dalam kehidupan sehari-hari.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam menyusun suatu karya ilmiah penggunaan metode sangatlah diperlukan karena di samping untuk mempermudah penelitian juga sebagai cara kerja yang efektif dan untuk memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau biasa disebut dengan *Field Research Kualitatif Deskriptif*. *Field Research Kualitatif Deskriptif* adalah suatu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau di lokasi penelitian dengan objek yang akan diteliti.

Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.³³

Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang mana pada penelitian ini hanya menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang

³³ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 63

terkait dengan judul penelitian serta data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah berupa kata-kata, dan gambar.

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pakue Kabupaten Kolaka Utara. Pemilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada saran orangtua penulis yang ingin mengetahui pandangan Islam terhadap masyarakat yang beragama Islam tapi tidak melakukan pembagian warisan sesuai dengan kewarisan Islam dalam hal ini masyarakat suku Tolaki yang ada di Kecamatan Pakue , dan juga lokasi penelitian ini merupakan daerah tempat tinggal penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun metode pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Syar'i, yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Pendekatan legalitas Formal adalah landasan Hukum, yaitu pendekatan yang merujuk pada perangkat perundang-undangan yang mengatur tentang masalah yang dibahas.
- c. Pendekatan sosiologis, yaitu peneliti menggunakan logika-logika dan teori sosiologis baik teori klasik maupun modern untuk menggambarkan fenomena

sosial keagamaan terhadap fenomena lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.³⁴

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu:

a. Data primer

Data primer ialah pengumpulan data yang diperoleh langsung melalui tanya jawab atau wawancara dengan narasumber yang ada dilokasi untuk mendapatkan keterangan. Sumber data primer ini berisi hasil wawancara antara penulis dengan pemangku adat Suku Tolaki Kecamatan Pakue dan pihak-pihak yang mengetahui tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data Primer, seperti Al-Qur'an dan Hadis, buku-buku, jurnal-jurnal, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan pada skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan rangkaian cara yang digunakan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data yang akurat. Dalam sebuah penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling utama karena tanpa pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan atau memperoleh

³⁴ Sayuthi Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.100

data sesuai dengan standar yang diharapkan. Oleh karenanya penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode *field research*.

1. Penelitian Lapangan

Adapun penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara:

- a. Obsevasi yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti. Penulis menggunakan observasi langsung ke daerah obyek penelitian. Penulis mengamati beberapa fakta yang ada di lokasi penelitian khususnya yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki.
- b. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab kepada narasumber untuk mendapatkan suatu keterangan. Dalam wawancara ini terlebih dahulu penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada salah seorang narasumber.
- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan beberapa data dan bahan yang berupa dokumen seperti data tentang letak geografis, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam hal ini penulis sebagai instrumen penelitian yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, melakukan pengumpulan data, memilih informan sebagai sumber data dimana peneliti mampu memahami teknik penelitian data sehingga bisa memberikan kesimpulan atas penelitiannya.

Peneliti harus memiliki alat ukur yang bisa digunakan dalam proses penelitian serta pengetahuan tentang metode penelitian kualitatif. Adapun instrumen penelitian yang dimaksud ialah berupa Laptop, Pedoman wawancara, dan handphone untuk merekam.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis data

Dari beberapa data yang terkumpul maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis agar supaya menghasilkan kesimpulan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif dengan menggunakan teknik induktif yaitu suatu proses yang berawal dari proposisi khusus dan berakhir pada suatu kesimpulan berupa asas-asas umum.³⁵ Cara inilah yang dipergunakan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sistem pembagian warisan pada masyarakat Tolaki di Kecamatan Pakue.

G. Pengujian Keabsahan Data

Adapun macam-macam pengujian kredibilitas menurut Sugiyono antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *membercheck*.

1. Perpanjangan Pengamatan

Hal ini dilakukan untuk menghapus jarak antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada lagi informasi yang disembunyikan oleh narasumber karena telah memercayai peneliti. Selain itu, perpanjangan

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.10

pengamatan dan mendalam dilakukan untuk mengecek kesesuaian dan kebenaran data yang telah diperoleh. Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan kembali data di lapangan telah kredibel.

2. Meningkatkan Ketekunan

Pengamatan yang cermat dan berkesinambungan merupakan wujud dari peningkatan ketekunan yang dilakukan oleh peneliti. Ini dimaksudkan guna meningkatkan kredibilitas data yang diperoleh. Dengan demikian, peneliti dapat mendeskripsikan data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

2. Triangulasi

Ini merupakan teknik yang mencari pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang terkumpul guna pengecekan dan pembandingan terhadap data yang telah ada.

BAB IV

SISTEM PEMBAGIAN WARISAN PADA MASYARAKAT ADAT SUKU TOLAKI DI KECAMATAN PAKUE, KABUPATEN KOLAKA UTARA, SULAWESI TENGGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Suku Tolaki merupakan etnis terbesar yang mendiami daratan Sulawesi Tenggara dan terbagi atas dua sub etnis yaitu Tolaki Konawe dan Tolaki Mekongga. Suku Tolaki biasanya menempati desa-desa dimana desa itu dihuni oleh masyarakat se-suku mereka. Masyarakat Suku Tolaki dulunya adalah masyarakat yang sangat tertutup, mereka tidak menyukai hidup berbaur dengan masyarakat suku lain. Namun lambat laun kebiasaan berpindah-pindah tempat akhirnya tidak bertahan dan sebagai gantinya mereka memilih menetap di sebuah perkampungan atau desa yang mayoritas penduduknya adalah se-suku mereka, dan hingga kini mereka mulai berbaur bahkan membangun hubungan kekeluargaan yang kuat dengan suku lain. Suku Tolaki tersebar di 7 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu:

1. Kota Kendari
2. Kabupaten Konawe
3. Konawe Selatan
4. Konawe Utara
5. Kolaka
6. Kolaka Utara
7. Kolaka Timur

Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari Utara ke Selatan berada di antara $2^{\circ} 46'45''$ - $3^{\circ} 50'5''$ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara $120^{\circ} 41'16''$ - $121^{\circ} 26'31''$ Bujur Timur.³⁶ Luas wilayah Kabupaten Kolaka Utara adalah $3.391,67 \text{ km}^2$, dengan 15 Kecamatan, dan 133 Desa, serta jumlah penduduk 134.771 jiwa.

Daerah Kecamatan Pakue merupakan salah satu dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara yang terletak di bagian utara yaitu melintang dari Utara ke Selatan dari $3^{\circ}15'0''$ LS - $3^{\circ}20'0''$ LS dan membujur dari Barat ke Timur antara $121^{\circ}0'0''$ BT - $121^{\circ}10'0''$ BT.

Wilayah Kecamatan Pakue mencakup wilayah daratan dan Lautan karena terletak di pesisir Pantai Teluk Bone. Luas daratan Kecamatan Pakue sebesar $313,25 \text{ km}^2$. Relief permukaan daratan Kecamatan Pakue terdiri dari daerah pegunungan di bagian Timur dan dataran yang landai serta terjal di bagian Utara, sedangkan di bagian Selatan mengarah ke Barat adalah berupa dataran merata hampir di sepanjang bibir Pantai Teluk Bone. Ketinggian wilayahnya mencapai $\pm 10 \text{ m}$ dari permukaan laut.

Dari luas wilayah tersebut Kecamatan Pakue memiliki beberapa sungai diantaranya Sungai Kondara dan Mikuasi. Sungai ini sangat potensial untuk dijadikan sumber kebutuhan air dalam rumah tangga dan irigasi pertanian masyarakat sekitar ataupun irigasi sederhana.

³⁶ Ruhmawati Sunusi, "Budaya Barter Pada Suku Tolaki Di Kabupaten Kolaka Utara" *Official website of Ruhmawati Sunusi*. <http://ruhm4.blogspot.com/2015/01/budaya-barter-pada-suu-tolaki-di.html?m=1> (15 Januari 2019)

Dari aspek kelautan, Kecamatan Pakue memiliki perairan laut yang sangat luas dan cukup untuk pengembangan usaha di bidang perikanan, dan pengembangan budidaya rumput laut. Keindahan Pantai Pakue dengan hamparan pasir putih dan tebaran alamiah batu karangnya yang membujur kearah Utara merupakan daya tarik tersendiri yang dapat di kembangkan sebagai objek Pariwisata di kecamatan ini.

Adapun batas wilayah Kecamatan Pakue adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pakue Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ngapa dan Uluiwoi Kabupaten Kolaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Watunohu
- Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Bone

Saat ini Wilayah Administrasi Pemerintahan Kecamatan Pakue hingga tahun 2018 dengan Ibukotanya Pakue terdiri dari 10 Desa dan 1 Kelurahan dengan 47 Dusun Lingkungan yakni:

1. Lalombundi
2. Toaha
3. Kasumeeto
4. Kosali
5. Mikuasi
6. Kelurahan Olo-oloho
7. Kondara
8. Sipakainga

9. Seuwwa

10. Alipato

11. Lalume

Dari 11 Desa/Kelurahan tersebut, seluruhnya dipimpin oleh kepala Desa/Lurah Laki-laki. Dari aspek pertahanan sipil, jumlah aparat Hansip selama 2 tahun terakhir mengalami penambahan seiring dengan berkembangnya Pakue sebagai Ibukota Kecamatan.

Pembangunan di bidang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diarahkan untuk menciptakan keselarasan dan kerukunan hubungan antara umat beragama, keharmonisan hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan penciptanya, serta manusia dengan alam sekitarnya

Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 28 unit tempat peribadatan yaitu terdiri dari 16 unit Masjid, 12 unit Langgar/Musholla. Dari 9873 jiwa penduduk Kecamatan Pakue 99.60% diantaranya adalah pemeluk Agama Islam dan 0,40% beragama Kristen Protestan.

B. Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung pada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini sangat dipengaruhi sistem kekerabatan yang berlaku di daerah setempat.

Dalam kehidupan masyarakat suku Tolaki dikenal adanya pembentukan kerabat dari dua jalur, yakni jalur keturunan dan jalur perkawinan. Sistem kekerabatan ini masih memegang peranan yang sangat penting.

Hukum adat waris Tolaki atau biasa juga disebut dengan *sara ine petiara* adalah *saarano mombetia hapo-hapo nobubunguno ana motuo lakoine ana ronga nggo-nggo tewali membetado*, yakni ketentuan-ketentuan adat yang mengatur tentang pembagian harta peninggalan dari orangtua kepada anak-anaknya dan kepada orang lain yang dipandang berhak untuk mendapat bagian.³⁷

Dalam kehidupan rumah tangga orang Tolaki, salah satu kewajiban pokok orang tua (ayah dan ibu) sebelum meninggal adalah membagikan harta warisan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan Hukum adat orang Tolaki.

Dahulu pembagian harta warisan terkadang dilakukan setelah orangtua telah meninggal dunia, namun cara seperti itu dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara ahli waris. Dalam perkembangannya, dimana orang Tolaki saat ini lebih cenderung mulai membagikan harta warisan tersebut selagi mereka

³⁷ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 185.

masih hidup, sehingga anak-anak mereka mulai langsung secara mandiri memelihara/merawat harta atau barang warisan yang menjadi miliknya.³⁸ Cara seperti itu, tentu saja akan mencegah terjadinya sengketa diantara ahli waris sepeninggal orangtua nantinya.

Secara umum pembagian harta warisan kepada ahli waris didasari oleh sebuah filosofi yakni “*tambuoki ana wula*” yang berarti bahwa tidak ada anak emas atau anak yang diistimewakan dalam sebuah keluarga.

Waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan.³⁹

1. *Nggo-nggo Tewali Mombetado* (Golongan Ahli Waris)

Beberapa golongan ahli waris menurut Hukum adat Tolaki biasa disebut dengan *Nggo-nggo tewali mombetado*. Berbicara mengenai beberapa golongan ahli waris maka dalam masyarakat suku Tolaki terdapat 5 (lima) jenis kerabat yang termasuk dalam golongan yang berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Lima golongan ahli waris itu adalah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris utama yaitu Anak
- 2) Ahli waris hubungan keatas yaitu Ayah dan Ibu

³⁸ Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, “*wawancara*” Pakue tengah, 9 September 2018.

³⁹ Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, “*wawancara*” Pakue tengah, 9 September 2018

- 3) Ahli waris golongan 2 dari hubungan keatas yaitu Kakek dan Nenek
- 4) Ahli waris dari garis samping yaitu Saudara pewaris dan keturunannya
- 5) Ahli waris kerabat jauh yaitu Saudara Orang Tua pewaris seperti Paman dan Bibi.

Yang tergolong sebagai ahli waris adalah seseorang yang mempunyai hubungan kekeluargaan, tali perkawinan, dan keturunan seperti anak, saudara-saudara, bapak dan ibu, kakek atau nenek serta janda atau duda. Adapun ahli waris yang lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan pewaris adalah ahli waris utama.

Kedudukan ahli waris utama dapat mengesampingkan posisi ahli waris lainnya bahkan dapat pula menghalangi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian dari warisan.

Berdasarkan hukum adat setempat, bahwa di daerah ini terdapat penggolongan ahli waris yang berhak menerima harta warisan dari orang tua berdasarkan golongan keutamaannya seperti anak yang merupakan keturunan langsung dari seseorang yang lahir dari hasil perkawinan yang sah. Kelompok anak ini telah menempatkan posisi sebagai ahli waris utama penerima warisan yang ditinggalkan oleh ayah atau ibunya.⁴⁰

Golongan ahli waris utama ini dapat menghalangi hak anggota keluarga lain yang termasuk ahli waris seperti ayah, ibu, nenek, kakek, saudara dan sebagainya.

⁴⁰ Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Pakue tengah, 13 Januari 2019.

Dengan adanya anak, maka bagian ayah, ibu, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan harta warisan akan terhalang sepenuhnya, yaitu tidak mendapatkan warisan sama sekali.

Berbicara masalah anak sebagai ahli waris utama, maka dikalangan masyarakat Tolaki tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat memperoleh warisan, melainkan anak zina (anak yang lahir di luar perkawinan), anak tiri dan anak angkat. Anak zina pada masyarakat Tolaki biasa juga disebut dengan *ana bule*, ini dianggap tidak mempunyai ikatan kekeluargaan dengan sang ayah yang membenihkannya, akan tetapi tetap mempunyai ikatan dengan sang ibu. Oleh karena itu baik hukum adat Tolaki maupun hukum Islam dalam hal pewarisan, menetapkan bahwa kedudukan anak zina itu hanya berhak menjadi ahli waris terhadap ibunya atau keluarga dari ibunya, dan sama sekali tidak dapat menjadi ahli waris dari ayahnya. Selanjutnya tentang anak angkat atau anak yang diambil dari anggota keluarga atau kerabat terdekat. Walaupun statusnya anak angkat, mereka tetap wajib menghormati dan menolong orangtua angkat layaknya orangtua kandung, dan sebaliknya jika anak angkat tersebut tidak memenuhi kewajibannya maka ia dapat dianggap memutuskan tali kekeluargaan dengan orangtua angkatnya.⁴¹

Pada ketentuan adat yang berlaku pada masyarakat suku Tolaki kedudukan anak angkat dapat diperlakukan sebagai anak keturunan sendiri baik lahir maupun batin. Apabila dalam masyarakat Tolaki ada seorang yang meninggal dunia dan mempunyai anak kandung serta anak angkat, maka dalam hal ini kedudukan anak

⁴¹ Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Pakue Tengah, 13 Januari 2019.

angkat dalam pembagian warisan sama rata dengan bagian anak kandung. Selain itu, anak angkat masih berhak untuk mendapatkan warisan dari orangtua kandungnya, jadi bisa dikatakan bahwa anak angkat memperoleh harta warisan dari dua sumber yaitu, orangtua kandung dan orangtua angkat.

Terkait dengan bagian warisan untuk anak angkat yang sama dengan anak kandung tidak dilakukan oleh salah seorang Ketua Adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue selaku Narasumber pada saat itu, alasannya ialah karena di Zaman sekarang anak-anak mempunyai kecemburuan sosial yang sangat tinggi, tidak seperti orang-orang terdahulu, agar tidak terjadi perselisihan antara si anak kandung dan si angkat maka jumlah bagian warisan akan dibedakan.

Adapun golongan ahli waris kedua yang berhak mendapatkan harta warisan selain anak adalah orangtua yaitu ayah dan ibu pewaris. Dalam hal ini apabila pewaris tidak mempunyai keturunan atau dalam bahasa Tolaki disebut *to tumanang*, maka kedua orangtua pewaris baru berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan warisan.

Untuk ahli waris golongan ketiga yaitu kakek dan nenek tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris apabila dalam hal ini ahli waris utama dan ahli waris kedua masih ada. Misalnya orangtua si pewaris masih hidup maka secara otomatis, hak kakek dan nenek untuk mendapatkan warisan ialah terhalang sepenuhnya.

Golongan ahli waris yang keempat adalah saudara pewaris beserta keturunannya. Saudara yang dimaksud adalah saudara dari pewaris, baik

kandung, seapak maupun seibu. Dalam hal ini kedudukan kakek dan nenek sebagai ahli waris lebih utama dari kedudukan saudara pewaris. Oleh karena itu saudara pewaris baru berhak mendapatkan warisan apabila ketiga golongan ahli waris yang terdahulu sudah tidak ada.

Selanjutnya ialah ahli waris golongan kelima yaitu saudara orang tua pewaris seperti paman dan bibi serta keturunannya. Kedudukan ahli waris ini sudah agak jauh, sehingga bisa dikatakan bahwa ahli waris ini jarang mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris.

2. Bagian Masing-masing Ahli Waris

Dalam masyarakat adat suku Tolaki jumlah bagian harta warisan untuk masing-masing ahli waris dari dahulu hingga saat ini, tidak mempunyai aturan baku yang tertulis, masyarakat Tolaki khususnya yang ada di Kecamatan Pakue lebih memilih membagi harta warisan kepada ahli waris secara musyawarah ataupun kekeluargaan selama tidak ada perselisihan yang terjadi di antara para ahli waris. Dan hal itu telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka.

Bagian yang diperoleh oleh ahli waris jumlahnya tidaklah secara pasti, tetapi jika menurut satuan benda yang ada seperti rumah, kebun, sawah, tanam-tanaman, hewan ternak dan sebagainya. Pewaris pada masyarakat Tolaki di Kecamatan Pakue, jarang memberikan warisan berupa uang kepada ahli warisnya, yang banyak diwariskan adalah kebun dan rumah, hal ini didasari karena sebagian besar kegiatan masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Pakue adalah berkebun. Mayoritas pewaris memberikan kebun dan hewan ternak kepada

anak laki-laki sedangkan rumah serta isinya berupa perabotan rumah tangga, emas dan perhiasan lainnya sudah mutlak menjadi bagian para ahli waris perempuan yang pembagiannya diatur secara adil oleh orangtua mereka.

Dalam Hukum adat pewarisan suku Tolaki, tidak mengenal sistem pembagian kuantitatif seperti dalam Hukum Waris Islam. Dalam pewarisan adat suku Tolaki lebih dikenal sistem yang sifatnya kualitatif melalui beberapa pola, yaitu:⁴²

- 1) Pola pertama, ada orang tua yang melebihkan pembagian bagi anaknya yang sulung dengan dasar pertimbangan karena dialah yang pertama membantu dan memikirkan keringanan dalam usaha mencari harta.
- 2) Pola kedua, ada orang tua yang melebihkan pembagian untuk anak yang laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan. Karena anak laki-laki kelak yang akan banyak mengeluarkan biaya dalam urusan perkawinannya nanti.
- 3) Pola ketiga, orangtua melebihkan pembagian kepada anaknya yang bungsu (*porambahi bunggae*) dengan dasar pertimbangan bahwa apabila sang ayah meninggal dunia, maka anak inilah yang nantinya terlambat mencapai kemampuan untuk mencari nafkah hidup.
- 4) Pola keempat, orangtua dapat melebihkan pembagian kepada anak yang buruk nasibnya (*maarasai daleno*) dengan dasar pertimbangan karena di antara semua bersaudara kandung dialah yang termiskin, sehingga perlu dibantu agar dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonominya.

⁴² Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, "wawancara" Pakue tengah, 13 Januari 2019

- 5) Pola kelima, ada juga orangtua yang tidak mau menetapkan besarnya pembagian untuk masing-masing anaknya, kecuali anak-anak itu sendiri secara bersama-sama meminta diberikan berdasarkan kesepakatan mereka untuk bagian mereka masing-masing secara tulus dan persaudaraan.

Adapun pola pertama dalam realisasinya saat ini terkadang tidak berjalan lancar karena anak-anak yang lain tidak menyetujui pola pembagian seperti itu, bahkan terkadang ada pula yang menentang dengan keras, akibatnya sering terjadi perselisihan di antara anggota keluarga tersebut. Jika hal ini terjadi maka dituntut keterlibatan kerabat dekat, pemangku adat (*rutobu*), pembicara (*pabbitara*), dan pemerintah setempat, namun jika tidak mendapat jalan keluar, maka dapat diselesaikan melalui pengadilan. Akan tetapi kejadian perselisihan seperti ini jarang terjadi bahkan bisa dikatakan tidak pernah terjadi di kalangan masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue.

Selain lima pola pembagian warisan tersebut, terdapat pula beberapa cara yang biasa dilakukan oleh orangtua masyarakat suku Tolaki ketika hendak memberikan bagian bagi masing-masing ahli warisnya yakni:

- 1) *Laala tumisokei nggotadono oka-oka o'ana*. Maksudnya bahwa orang tua mulai mengenalkan kepada anak-anak mereka mengenai barang atau harta benda yang dimiliki oleh orangtua mereka, maka sejak saat itu sang ayah sebenarnya telah menunjukkan atau memperkenalkan kepada masing-masing anak tentang bagian warisan yang akan diperoleh kelak. Maksudnya adalah agar mereka mulai memelihara dengan baik harta benda tersebut.
- 2) *Laala meoliwi* atau berwasiat, artinya sebelum sang ayah meninggal dunia, ia

telah berasiat melalui keluarga dekat atau kepada orang-orang tertentu bahwa jika kelak ia meninggal dunia, maka anak-anaknya telah ditentukan harta benda tertentu yang akan menjadi bagiannya masing-masing.

- 3) *Laala mepasabi* atau menyimpan amanat, maksudnya adalah bahwa apabila ia kelak meninggal dunia, maka seluruh harta peninggalannya harus dibagikan kepada anak-anaknya. Keinginan ayah tersebut langsung diamanahkan secara langsung kepada semua anak-anaknya.
- 4) *Laala pinoweahiako nggotadono*. Artinya bahwa ketika anak telah menikah, maka sang ayah langsung menyerahkan atau menunjukkan harta tertentu sebagai bagiannya dari seluruh harta warisan yang ada.

Demikian pula halnya jika seorang ayah tidak memiliki anak, maka sebelum meninggal dunia ia akan berpesan kepada saudara-saudara dekatnya agar kelak harta bersama yang diperoleh dari perkawinannya dengan seorang wanita akan berlaku dengan beberapa hal sebagai berikut:⁴³

- 1) Harta benda tersebut akan menjadi milik isteri yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan bagi kehidupan sehari-hari sampai akhir hayat si istri dan sepanjang ia tidak menikah lagi dengan laki-laki lain.
- 2) Jika istri dari suami yang meninggal kemudian menikah lagi, maka harta peninggalan bersama itu harus jatuh kepada ayah atau ibu pewaris. Demikian pula kakek dan neneknya sudah meninggal dunia, maka harta warisan tersebut akan jatuh ke tangan saudara-saudara kandung dari si

⁴³ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 193.

pewaris. Tentu saja terlebih dahulu diperiksa bagian yang layak kepada istri almarhum atau si pewaris.

- 3) Jika semasa hidup pasangan suami-istri tersebut mengangkat anak, maka jika selepas suami meninggal dunia, anak angkat mereka juga dapat diberikan bagian oleh istri atau ibu angkatnya, meskipun anak angkat tersebut akan menikah atau pergi merantau.
- 4) Salah satu hal yang penting adalah bahwa harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris tersebut, telah bersih dari utang dari pewaris kepada pihak lain selama hidup di dunia. Dalam hal ini, jika suami atau ayah yang meninggal dunia meninggalkan utang kepada pihak lain, maka utang tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu yang diatur oleh sang istri, dan sisanya barulah diwariskan kepada segenap ahli warisnya.

3. Cara dan Waktu Pelaksanaan Pewarisan

Didalam hukum Islam berbicara masalah warisan tidak lepas dari pembahasan mengenai waktu pelaksanaan dan pembagian warisan yakni, pembagian warisan baru akan dilakukan apabila si pewaris telah meninggal dunia dan telah bersih dari sangkutan-sangkutan pembiayaan dan hutang piutang. Begitupula dalam adat Tolaki, waktu pelaksanaan warisan kadangkala menjadi perbincangan dikalangan keluarga.

Adapun pembagian warisan pada masyarakat adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue dilakukan dengan beberapa cara yakni, melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama antara sesama anggota keluarga yang bersangkutan, dimana pelaksanaannya dihadiri oleh seluruh ahli waris dan

pewaris, sebagai saksi terkadang dihadirkan pemangku adat. Akan tetapi pada umumnya pembagian ini dilakukan secara kekeluargaan saja, tanpa melibatkan *putobu* (pemangku adat) atau tokoh masyarakat lainnya.

Beberapa Kepala Keluarga pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Pakue melakukan warisan hanya dengan memberitahu secara langsung kepada ahli warisnya ketika sedang berada di tempat yang akan diwariskan, misalnya pada saat berkebun, si pewaris cenderung mengajak salah seorang ahli waris dan langsung memberitahu bahwa Kebun ini adalah milik si ahli waris. Setelah diberikan seperti itu, maka Kebun tersebut harus dikelola sendiri oleh ahli waris.

Sedangkan waktu pelaksanaan pewarisan atau dengan kata lain beralihnya harta warisan kepada ahli waris, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan berlangsung pada saat pewaris masih hidup.

Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum adat yang berlaku pada masyarakat suku Tolaki, dimana pewaris sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan yaitu:

- 1) Pada waktu si anak sudah dikawinkan atau anak itu sudah dapat hidup sendiri, maka akan diberikan harta warisannya sebagai modal dasar dalam membina rumah tangganya.
- 2) Pada waktu pewaris sudah lanjut usia dan memperkirakan bahwa umurnya sudah tidak lama lagi, maka pewaris menentukan dan memberikan bagian masing-masing ahli warisnya.

Dalam praktek masyarakat Tolaki yang ada di Kecamatan Pakue, para orangtua kebanyakan memberikan bagian warisan pada ahli warisnya apabila

ahli waris ingin merantau atau hendak melanjutkan pendidikan di luar Daerah misalnya ingin berkuliah.

Selain penyerahan seperti itu, terdapat pula beberapa keluarga yang melakukan pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia, hal ini didasarkan pada perubahan pola pikir yang cenderung ingin mengikuti tata cara pembagian warisan dalam Islam dibandingkan dengan mengikuti Hukum adat yang berlaku.

Dalam kondisi yang demikian, cara pengalihan hak atas harta peninggalan pada masyarakat suku Tolaki tidaklah terikat, bisa dialihkan sebelum meninggal atau sesudah meninggal tergantung dari kesepakatan pewaris dan para ahli warisnya.

4. *Hapo-hapo Tetewalipinetia* (Objek Harta Warisan)

Hapo-hapo sinuaro meowali salamatokaaro pealo adalah istilah yang biasa digunakan dalam suatu keluarga masyarakat Tolaki tentang adanya harta milik suami/istri sendiri dan harta hasil perolehan mereka bersama selama dalam perkawinan.

Terkait dengan ini, dalam Hukum adat maupun Hukum Islam telah ditetapkan, bahwa harta warisan adalah semua harta peninggalan pewaris yang dimiliki dimasa hidupnya, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, begitupula dengan utang-piutang.

Pada masyarakat suku Tolaki di Kecamatan Pakue lebih mengenal jenis harta warisan yang berupa benda-benda materil seperti tanah, rumah, kendaraan, kebun, emas dan sebagainya.

Selain itu, dikenal juga kekayaan yang sifatnya immaterial berupa hak-hak dan kewajiban, seperti hak sewa atas sebuah rumah, hak bagi hasil (*teseng*), hak gadai atas tanah dan sebagainya. Adapun penggunaan hak sewa dan hak gadai yang dimaksudkan, dimana bendanya tidak dapat diwarisi tetapi hak pemanfaatan dari benda tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Selain itu jenis harta warisan lainnya yang bisa diwariskan adalah benda-benda pusaka (*hapo-hapo ine pue*) yaitu harta benda peninggalan dari nenek moyang.

Dalam adat Tolaki dikenal juga pengelompokan harta warisan menurut sumber atau asalnya yaitu:⁴⁴

- 1) *Uhu-uhuono toono meohai* adalah harta suami atau istri yang merupakan hibah atau pemberian dari kerabat yang dibawa dalam keluarga. Harta tersebut termasuk harta benda yang diberikan oleh orangtua masing-masing.
- 2) *Hapo-hapo pada sinuaromeowali rotaahori mealo atawa mealoirato* adalah harta hasil usaha suami istri sebelum atau sesudah perkawinan.
- 3) *Hapo-hapo pomboweehino toono tembono rokawi/tekonggo* adalah harta yang merupakan hadiah kepada suami/istri saat perkawinan.
- 4) *Hapo-hapo sinuaromeowali salamatokaa ropealo* adalah harta suami atau istri yang diperoleh selama masa perkawinan.
- 5) *Hapo-hapo ari ine pada anamotuoro meowali* adalah harta pusaka yang diberikan oleh orangtua suami atau istri.

Seiring berjalannya waktu, kehidupan masyarakat adat suku Tolaki di

⁴⁴ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 188.

Kecamatan Pakue semakin berkembang dan sudah menerima ajaran-ajaran atau Hukum selain Hukum adat daerah setempat seperti Hukum Islam oleh karena itu ada beberapa aturan-aturan Hukum Islam yang kini sudah diterapkan oleh masyarakat setempat salah satunya dalam hal pewarisan. Sehingga dari beberapa tahun terakhir penetapan mengenai kewarisan pada masyarakat adat Tolaki menggunakan dua ketentuan Hukum yang dilakukan secara berdampingan yaitu secara Hukum adat dan Hukum Islam.

C. *Sistem Pembagian Warisan Islam pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara*

Pembagian harta warisan merupakan suatu perbuatan dari para ahli waris bersama-sama. Serta pembagian itu diselenggarakan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dari para ahli waris. Apabila harta warisan dibagi-bagi antara para ahli waris maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun didalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap ahli waris, pembagian berjalan atas dasar kerukunan.⁴⁵

Selain secara adat, beberapa keluarga pada masyarakat adat suku Tolaki juga menerapkan sistem pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam, baik itu dari segi ahli waris, jumlah bagian masing-masing ahli waris, maupun waktu pelaksanaannya.

Saat ini, sangat banyak ketentuan-ketentuan adat yang telah dipengaruhi oleh ajaran Hukum Islam salah satunya ialah yang menetapkan bahwa bagian

⁴⁵ Tolib Seriady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2008) h. 296

seorang laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Misalnya dalam hal ini apabila jenis kelamin ahli waris sama maka harta peninggalan bisa dibagi sama akan tetapi jika ahli waris terdiri dari laki-laki dan perempuan maka pembagian warisan harus berdasarkan perbandingan dua banding satu. Ketentuan tersebut berjalan berdampingan dan dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat adat suku Tolaki.

Masyarakat setempat berpendapat bahwa berbedanya bagian antara laki-laki dan perempuan itu didasari karena tanggungjawab yang dimiliki oleh anak laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan tanggungjawab seorang perempuan. Pandangan seperti ini tidak saja berasal dari ajaran agama Islam, melainkan telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat setempat, sehingga pembagian tersebut dinilai sebagai satu kesatuan yang wajar dan adil.

Berbicara tentang jumlah bagian anak laki-laki dan perempuan, Munawir Syadzali mantan Menteri Agama Republik Indonesia pernah mengeluarkan argumen terkait pembagian harta warisan umat Islam di Indonesia bahwa memberikan bagian yang sama rata antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi argumen tersebut ditolak oleh para Ulama pada saat itu karena sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Jumlah bagian laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1 telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa (4) : 11 sebagai berikut

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan”

Pada masyarakat suku Tolaki, ahli waris utama adalah anak. Oleh karena itu apabila pewaris mempunyai anak, maka anggota keluarga yang lain akan terhalang haknya untuk mendapatkan warisan. Berbeda halnya dalam Hukum Islam, dimana yang menjadi ahli waris bukan hanya anak melainkan anggota keluarga yang lain seperti ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi dsb mempunyai hak untuk mendapatkan warisan, dan telah ditentukan bagiannya masing-masing didalam QS. An-Nisa (4) : 11-12 yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

حَكِيمًا

Terjemahnya:

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja),

maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً
أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu

lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Secara garis besar hukum kewarisan Islam menetapkan dua macam ahli waris, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan secara pasti dan ahli waris yang bagiannya masih terbuka karena tidak ditentukan bagiannya secara eksplisit.⁴⁶ Di dalam nas telah disebutkan bagian-bagian tertentu dan disebutkan pula ahli waris dengan bagian tertentu itu. Bagian tertentu itu dalam Al-qur'an dikenal dengan istilah *furud* itu adalah bentuk pecahan yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$. Berdasarkan ayat tersebut maka beberapa keluarga pada masyarakat suku Tolaki menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, dan berapa bagian yang diperoleh untuk masing-masing ahli waris.

Dahulu pembagian harta warisan terkadang dilakukan setelah orangtua telah meninggal dunia, namun cara seperti itu dapat memungkinkan terjadinya perselisihan diantara ahli waris. Dalam perkembangannya, dimana orang Tolaki saat ini lebih cenderung mulai membagikan harta warisan tersebut selagi mereka masih hidup, sehingga anak-anak mereka mulai langsung secara mandiri memelihara/merawat harta atau barang warisan yang menjadi miliknya. Cara seperti itu, tentu saja akan mencegah terjadinya sengketa diantara ahli waris sepeninggal orangtua nantinya. Secara umum pembagian harta warisan kepada

⁴⁶ Muhammad Mirwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul (Studi Terhadap Waktu Pelaksanaan, Ahli Waris dan Bagiannya)”, *skripsi* (Yogyakarta:Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013), h. 66

ahli waris didasari oleh sebuah filosofi yakni “*tambuoki ana wula*” yang berarti bahwa tidak ada anak emas atau anak yang diistimewakan dalam sebuah keluarga.⁴⁷

Waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan.

D. Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Suku Tolaki di Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara

Dalam hukum Islam terdapat dua unsur yang sangat penting yaitu unsur normatif dan unsur kontekstual. Al-Qur'an adalah sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an memuat segala bentuk aturan yang menjadi pedoman bagi umat manusia di seluruh tempat yang ada di dunia ini, dan berlaku sepanjang zaman. Selain itu Al-qur'an juga memiliki kandungan transendental yang meletakkan norma bagi pelaku keseharian manusia dan memberi arahan untuk kehidupan akhirat.⁴⁸

⁴⁷ Abdul Hafid, *Sara Ine Petiaria*, (Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012), h. 187.

⁴⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA, 2000) h.12-19

Al-Qur'an telah menjelaskan secara keseluruhan dan sangat jelas dalam ketentuan-ketentuannya. Al-Qur'an merupakan sumber pokok pengesahan hukum kewarisan Islam. Sumber kewarisan Islam ada tiga, tetapi pada hakikatnya kedua sumber sesudahnya (Sunnah dan Ijtihad) harus diacukan kepada Al-Qur'an. Khusus kaitannya dengan Hukum kewarisan dalam Islam.

Hukum kewarisan sebagai pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu berlaku secara universal bagi seluruh umat Islam dan mengandung nilai-nilai yang bersifat abadi.⁴⁹ Walaupun dengan adanya Al-Qur'an dan Sunnah masih sangat diperlukan adanya ijtihad dalam beberapa hal karena masih sangat dibutuhkan penjelasan dan penafsiran yang lebih terperinci.

Menurut Sajuti Thalib, corak kehidupan masyarakat pada suatu daerah tertentu bisa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hukum kewarisan Islam, walaupun pengaruh itu hanya dipandang relevan selama tidak melampaui garis-garis pokok dari ketentuan hukum kewarisan yang baku.⁵⁰

Sistem kewarisan tidak hanya terdapat didalam hukum Islam saja, akan tetapi didalam hukum adat juga dibahas masalah sistem kewarisan adat yang telah ada sejak zaman dahulu. Pengertian harta warisan menurut adat adalah menurut pengertian umum warisan bahwa semua harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris) baik yang sudah terbagi maupun yang belum terbagi atau memang tidak terbagi. Jadi, harta warisan ini adalah harta kekayaan seorang pewaris karena telah wafat dan apakah harta kekayaan orang itu

⁴⁹ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995) h. 1-2

⁵⁰ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara 1982) h.74

akan dibagi atau tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi maksudnya harta warisan itu terbagi-bagi kepemilikannya kepada para ahli warisnya, dan suatu pemilikan atas harta warisan tidak berarti pemilikan mutlak perseorangan tanpa fungsi sosial.

Adat adalah himpunan kaidah sosial dalam masyarakat luas, tidak termasuk Hukum Syara' (Agama), kaidah-kaidah tersebut ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, seolah kehendak atau peraturan warisan nenek moyang mereka, bahkan seolah suatu keharusan yang bersumber dari tuhan.⁵¹

Menurut hukum adat suatu pemilikan atas harta warisan masih dipengaruhi sifat kerukunan dan kebersamaan, masih dipengaruhi oleh rasa kebersamaan keluarga dan keutuhan tali persaudaraan.

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif maupun mayorat dalam suatu hukum waris tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat dimana hukum kewarisan itu berlaku. Sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal.

Di lingkungan masyarakat adat yang asas pewarisannya individual, apabila pewaris wafat maka para ahli waris berhak atas bagian warisannya. Disamping itu, ada warisan yang tidak dapat dibagikan penguasaan atau kepemilikannya karena

⁵¹ M.Abdul Mujieb, dkk. *Kamus Istilah Fikih*. h.3

sifat benda, keadaan dan gunanya tidak dapat dibagi dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama.⁵²

Sebagian besar masyarakat Indonesia dalam hal kewarisan masih berada pada garis demarkasi antara hukum adat dan hukum Islam, dimana hukum Islam belum berlaku sebagaimana mestinya pada sebagian besar masyarakat yang beragama Islam. Pada sebagian masyarakat di beberapa daerah atau pada kelompok-kelompok tertentu, masih berpegang teguh pada hukum kewarisan adat yang ada di daerahnya.

Terkait dengan hal ini sistem pembagian warisan pada masyarakat suku Tolaki tidak terlepas dari ketentuan atau hukum adat yang berlaku. Hukum adat di dalam Islam atau dalam Ushul Fiqh dikenal dengan sebutan '*Urf*' atau adat/kebiasaan. Adat atau '*Urf*' tetap bisa dilaksanakan dengan syarat bahwa adat kebiasaan tersebut tetap bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat, serta harus berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, ataupun dikalangan sebagian besar warganya.

Hukum yang berdasarkan '*urf*' atau adat dapat berubah pada masa atau tempat tertentu. Oleh karena itu, '*urf*' terbagi atas dua macam yaitu:

1. '*urf sahih*', ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara'. Maka dari itu '*urf*' yang *sahih* wajib dipelihara dalam pembentukan Hukum dan peradilan.

⁵² Anandasasmita, Komar. *Pokok-pokok Hukum Waris*. (Bandung:IMNO Unpad)1984, h.156.

2. *'urf fasid* (adat kebiasaan yang rusak) ialah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Maka dari itu *'urf* yang fasid tidak wajib diperhatikan dalam pembentukan Hukum dalam peradilan.⁵³

Seperti halnya dalam penelitian ini yaitu pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue, pembagian harta warisannya tidak menggunakan ketentuan yang sudah ada di dalam Hukum kewarisan Islam, melainkan menggunakan ketentuan adat masing-masing. Masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue cenderung memakai cara musyawarah atau kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah yang berkenaan dengan kewarisan.

Sistem kewarisan adat Tolaki yang ada dalam masyarakat Kecamatan Pakue, yaitu sistem dan praktik penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang akan dibagi-bagi kepada seluruh ahli waris yang dilimpahkan kepada anak yang berkedudukan sebagai ahli waris utama.

Pembagian warisan adat suku Tolaki sering sekali disalah tafsirkan oleh anggota keluarga yang tidak mendapatkan harta warisan. Bagi salah seorang anak yang lebih dekat dengan orangtua terkadang mendapatkan warisan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan anak yang lain. Anak yang dalam praktiknya mendapatkan warisan lebih banyak hanyalah sebagai pengganti pemegang harta orangtua bukanlah sebagai pemilik keseluruhan harta secara perorangan, dia hanya berkedudukan sebagai pemegang mandat orangtua yang dibatasi oleh

⁵³ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991) h.124

sebuah masyawarah keluarga, dan dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga yang lain, tidak hanya melihat berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong.

Jalan keluar dari kemungkinan munculnya perselisihan diantara para ahli waris dikemudian hari, pewaris dimasa hidupnya seringkali telah menunjukkan bagaimana cara mengatur harta kekayaan keluarganya. Jadi sebelum pewaris meninggal dia telah berpesan dan membagikan harta kepada anak-anaknya tentang kedudukan harta kekayaannya.

Terkait dalam hal ini, sistem pembagian adat Tolaki sangatlah bertolak belakang dengan apa yang telah ditentukan didalam Al-Qur'an. Namun demikian betapapun ketetapan Allah Swt. mengenai pembagian harta warisan yang harus ditaati oleh umat Islam dengan disertai ancaman hukuman sebagaimana firman Allah dalam QS al-Nisa/4:14:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ

مُهِيٓمٌ

Terjemahnya:

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”⁵⁴

Dalam kewarisan adat suku Tolaki, ahli waris utama adalah anak, baik itu anak kandung, anak angkat maupun anak tiri kedudukannya adalah sama. Tetapi

⁵⁴ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.181.

dalam hal kewarisan Islam, anak angkat tidaklah sama dengan anak kandung, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS al-Ahzab/33:4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

Terjemahnya:

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Berdasarkan kedua ayat diatas, maka dapat dipahami bahwa anak angkat tidak dapat dianggap sebagai anak kandung, dia tetap dihukumkan orang asing. Dan tidak berhak menjadi ahli waris dan tidak mendapatkan bagian yang sama dengan anak kandung.

Menurut Ardat salah seorang Kepala Adat suku Tolaki pembagian warisan tidak dilakukan berdasarkan ketentuan agama Islam dan dilakukan secara hukum adat karena hukum kewarisan adat lebih dulu ada dibandingkan dengan agama Islam, dan penerapannya lebih sulit dibandingkan dengan ketentuan adat yang berlaku yang lebih menggunakan asas kekeluargaan.⁵⁵

Kemudian Lamatu seorang *pabitara* masyarakat adat suku Tolaki mengatakan bahwa tidak dipakainya hukum Islam dalam pembagian warisan karena tidak adanya suatu keharusan bagi manusia untuk melaksanakannya. Karena yang terpenting dalam suatu pembagian warisan adalah bagaimana caranya membagikan warisan dengan cara yang damai tanpa adanya konflik, sehingga yang diutamakan adalah rasa persatuan keluarga, rasa saling rela dan saling menerima. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.⁵⁶

Praktik yang terjadi pada masyarakat adat suku Tolaki dalam hal pembagian warisan yang tidak menggunakan ketentuan agama Islam terkesan mendua. Disatu sisi merupakan muslim, tetapi di sisi lain tidak menjalankan syari'at secara utuh, barangkali hal ini karena kurangnya kuatnya peranan umat Islam dalam mensosialisasikan hukum kewarisan Islam. Sehingga mereka lebih tahu masalah kewarisan adat yang sudah turun-temurun dan mendarah daging. Walaupun demikian, kita tidak bisa memvonis secara langsung bahwa apa yang dilaksanakan

⁵⁵ Ardat, Kepala Adat suku Tolaki, “*wawancara*” Pakue tengah, 13 Januari 2019.

⁵⁶ Lamatu, Pabitara Suku Tolaki Kecamatan Pakue, :”*wawancara*” Kondara, 14 Januari 2019.

oleh masyarakat adat suku Tolaki adalah haram, karena bila kita pahami lanjut terhadap praktik pembagian harta warisan pada masyarakat suku Tolaki dengan cara musyawarah dan perdamaian tidaklah merugikan orang lain.

Sebab ahli waris menggunakan hak mereka sesuai dengan kehendak dan atas saling rela para ahli waris dan anggota keluarga lainnya dalam pembagiannya, yaitu: tentang jumlah dan besarnya bagian masing-masing ditentukan atas dasar ketentuan adat yang disepakati secara bersama-sama. Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Sistem pembagian warisan yang demikian sebenarnya telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Adapun sistem pembagian warisan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*. Pembagian dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris.⁵⁷

Pembagian harta warisan dengan metode ini bisa saja keluar dari ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw. namun atas dasar kesepakatan serta kerelaan antara pewaris dan ahli warisnya demi kemaslahatan bersama.

⁵⁷ Hariyah, "*Al-Takharuj dan Praktiknya*" , <http://harijahdamis.blogspot.com/2012/07/al-takharuj-dan-praktik-pembagian.html> (17 Januari 2019)

Selain itu tujuan *takhāruj* yakni untuk mendapatkan kemaslahatan bersama sejalan dengan kaidah Fikih

إِنَّمَا تَكُونُ الْمَصْلَحَةُ فَلَمْ يَسْرِعْ لِلَّهِ

Kaidah Fikih tersebut menjelaskan bahwa apabila sesuatu perbuatan Hukum menghasilkan kemaslahatan, disanalah Hukum Allah. Hakekat dari maslahat itu sendiri ialah segala sesuatu yang mendatangkan keuntungan, dan menjauhkan dari bencana.

Walaupun pada dasarnya pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue dilakukan berdasarkan atas dasar perdamaian dan kekeluargaan dalam pembagiannya, akan tetapi konsep *Takhāruj* tidak tercermin dalam proses pembagian warisan masyarakat adat Tolaki.

Di dalam bermusyawarah tidak ada pihak yang merasa haknya diambil atau dirugikan dan juga tidak terdapat unsur memakan harta orang lain secara bathil atau tidak hak. Memakan harta bathil itu dapat dipahami sebagai memakan harta atau menggunakan hak orang lain yang tidak merelakannya. Dengan demikian batas antara memakan harta orang lain secara hak dan secara bathil terletak pada kerelaan yang punya hak itu, bila yang punya hak merelakannya, maka tindakan tersebut adalah hak dan terhindar dari memakan hak orang lain secara bathil sebagaimana yang dilarang dalam QS al-Nisa/4:29:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Kemudian juga terdapat dalam QS al-Baqarah/2:188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahnya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. “

Praktik *Takhāruj* dalam pembagian harta warisan, pada dasarnya merupakan penyimpangan terhadap ketentuan *nash* . namun demikian hal tersebut dapat dibenarkan jika tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum Islam. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ali Darokah bahwa “ketentuan hukum dapat berubah atau beralih apabila syarat dan tujuan dari ketentuan hukum sebuah *nash* tidak terpenuhi”. Sebab dalam memakai ketentuan *nash* dalam al-Qur’an dan sunnah untuk diterapkan terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu secara umum tujuan Allah dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum.

Pada masyarakat adat suku Tolaki mengenal rasa saling rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakikatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam kategori fikhi karena sesuai dengan tujuan ditetapkannya syariat

Islam yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta. Sehingga dalam hukum Islam kategori fikhi bahwa pembagian harta warisan suku Tolaki tidak bertentangan dengan substansi dalam syariat Islam.

Maka hal demikian diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam, jika ahli waris bersepakat dengan dengan damai dalam pembagian harta warisan setelah para ahli waris menyadari masing-masing bagiannya, dan perihal tersebut terlepas dari memakan harta dengan jalan yang tidak hak sebagaimana yang dilarang dalam al-Qur'an. Sehingga apabila ada ahli waris yang keberatan dan menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan praktik kewarisan yang digunakan adat tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam karena harus dengan asas kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahan keluarga, bahkan dapat juga menimbulkan distorsi atau gangguan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid syari'ah*) yang justru menuai kemudharatan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat.

Hukum adat pewarisan suku Tolaki berjalan berdampingan dengan hukum pewarisan Islam dan telah menjadi aturan yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Antara hukum adat pewarisan orang Tolaki dengan hukum Islam, disamping terdapat aturan yang sama juga terdapat aturan yang berbeda. Aturan yang sama antara hukum kewarisan Islam pelaksanaannya saling memperkuat, akan tetapi mengenai aturan yang berbeda telah menjadi hubungan timbal balik antara kedua hukum tersebut.

Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian, maka perdamaian menjadi suatu jalan yang sangat terpuji. Jika perselisihan adalah keburukan, pertengkaran dan pertikaian adalah aib, maka sebaliknya, perdamaian dan usaha mendamaikan adalah sebuah rahmat. Meski perbedaan pendapat pada manusia adalah hal yang telah digariskan oleh Allâh Azza wa Jalla sebagaimana firman-Nya :

بَلِّغْ مَا نُنَزِّلُ فِي الْقُرْآنِ وَلْيَسِّرْ لَهُ سُبُلَ الْوَسْطَىٰ

Terjemahnya:

“Jikalau Rabbmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. [Hud/11:118]”

Namun Allâh mengecualikan darinya orang-orang yang mendapat rahmat-Nya.

إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

Allâh swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 4 :

وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Terjemahnya:

“Dan perdamaian itu lebih baik”.

Perdamaian yang terwujud pada umat akan menjadikannya indah, namun jika hilang maka berbagai buruk tidak akan terhindarkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penggolongan ahli waris pada suku Tolaki adalah anak/cucu merupakan ahli waris utama. Dengan adanya anak maka bagian ayah, ibu, kakek, nenek, dan keluarga lainnya untuk mendapatkan harta warisan menjadi terhalang sepenuhnya, yaitu sama sekali tidak mendapatkan harta warisan. Dalam hubungannya dengan kedudukan anak sebagai ahli waris, maka di kalangan masyarakat Tolaki tidak hanya mengenal anak kandung saja yang dapat memperoleh warisan, melainkan anak zina (anak yang lahir diluar perkawinan), anak tiri dan anak angkat.
2. Waktu pelaksanaan pewarisan, tidaklah ditentukan setelah wafatnya pewaris, tetapi proses pewarisan boleh saja berlangsung pada saat pewaris masih hidup. Hal ini didasarkan pada ketentuan Hukum adat yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki, dimana si pewaris yang bersangkutan sudah mengalihkan sebagian hartanya kepada ahli warisnya dengan melalui berbagai pertimbangan.
3. Dalam hukum adat pewarisan suku Tolaki, tidak mengenal sistem pembagian kuantitatif seperti dalam Hukum waris islam, yakni $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{8}$. Dalam pewarisan adat suku Tolaki lebih dikenal sistem yang sifatnya kualitatif melalui beberapa pola, yakni:
 - a. Pola pertama, melebihkan pembagian bagi anak yang sulung
 - b. Pola kedua, melebihkan pembagian untuk anak laki-laki

- c. Pola ketiga, memberikan pembagian kepada anak bungsu (*porambahi bunggae*)
 - d. Pola keempat, memberikan pembagian kepada anak yang buruk nasibnya (*maarasai daleno*)
 - e. Pola kelima, memberikan warisan sesuai dengan keinginan anak masing-masing..
4. Sistem pembagian warisan pada masyarakat adat suku Tolaki Kecamatan Pakue sebenarnya telah tertuang pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 yaitu pembagian warisan bisa dilakukan dengan cara sistem kekeluargaan atau damai. Adapun sistem pembagian warisan dengan cara kekeluargaan atau perdamaian dalam Hukum Islam dikenal dengan istilah *takhāruj*.

B. Implikasi Penelitian

1. Sistem pembagian warisan yang berlaku pada masyarakat adat suku Tolaki Kecamatan Pakue, mengevaluasi unsur keadilan dan kemaslahatan keluarga. Oleh karena itu sangat diperlukan musyawarah antara ahli waris yang benar-benar menghasilkan keputusan yang adil agar dapat diterima benar-benar rela dan ikhlas.
2. Kepada para Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat dan komponen lainnya, hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang Hukum kewarisan Islam, sehingga ada sinkronisasi yang lebih

signifikan antara sistem pembagian warisan menurut adat dan menurut agama.

3. Mengingat persoalan kewarisan Islam merupakan hal yang sangat penting untuk dikembangkan, maka kepada seluruh umat Islam khususnya pada masyarakat adat suku Tolaki Kecamatan Pakue, disarankan agar senantiasa mempelajari dan mengamalkan aturan-aturan kewarisan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an, Kementrian Agama RI.

Buku-buku

Ahmad, Beni Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, 2012.

Ali, Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ali, Utsman. "Pengertian & Ruang Lingkup Hukum Islam", *Official Website Of Pengertian Pakar*. <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/pengertian-dan-ruang-lingkup-hukum-islam.html#22> September 2018.

Anshary. *Hukum Kewarisan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Daud, Muhammad Ali. *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 1990.

Fredikurniawan. "Pengertian Sistem Secara Umum & Menurut Para Ahli", *official website of Fredi Kurniawan*. <http://fredikurniawan.com/pengertian-sistem-secara-umum-dan-menurut-para-ahli/> (18 September 2018)

Hafid, Abdul. *Sara Ine Petiaria*. Makassar: Balai Pelestarian Nilai Budaya, 2012.

Hanafi, Ahmad. *Pengantar & Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 1991.

Haris, Mustari. "Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)", *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin 2016.

Harjono, Anwar. *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*. Jakarta: PT. Midas Surya Grafindo, 1987.

J, Lexy Moeleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja

- Rosdakarya, 2006.
- Jakfar, Idris dan Taufik Yahya. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jambi: Pustaka Jaya, 1995.
- Komar, Anandasasmita. *Pokok-pokok Hukum Waris*. Bandung:IMNO Unpad,1984.
- Mirwan, Muhammad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Warisan Di Desa Girisuko, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunungkidul”, *Skripsi*. Yogyakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2013.
- Muhammad, Ash-Shabuni Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press,1996.
- Mustari, Suriyaman Pide. *Hukum Adat Dahulu, kini, Dan Akan Datang*, Cet.II; Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Ramadhan, Said. *Islamic Law*. London: P.R. Mac Millian Limited, 1961.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers,2016.
- Sudiyat, Imam. “Peta Hukum Waris di Indonesia”. *Kertas Kerja Simposium Hukum Waris Nasional*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, 1989), h.17, dalam Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Kencana Renada Media Group, 2006.
- Sudiyat, Imam. *Hukum Adat*, Cet. VII; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Supardin. *Materi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Supardin. *Fikhi Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Makassar: Alauddin University Press, 2017.
- Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1991.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2009.

Tesis Hukum. “Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli”, *Situs Resmi Tesis Hukum*. <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli/>. 23 September 2018.

Wahab, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utami Semarang, 1994.

Wikipedia. *Hukum Waris* (URL: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_Waris)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan : Wawancara dengan H. Songke terkait sistem pembagian warisan adat suku Tolaki di Kecamatan Pakue Kolaka Utara.



**Keterangan : Wawancara dengan salah seorang pegawai Kecamatan Pakue
Kolaka Utara Pak Alimus.**



**Keterangan : Wawancara dengan Pak Lamatu salah seorang *Pabitara* suku
Tolaki di Kecamatan Pakue dan Pakue Tengah.**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Wahyuni Pratiwi, akrab disapah Uni, lahir di Kolaka, 13 September 1997 dari perpaduan suku Bugis dan suku Makassar yakni antar pasangan Bapak Muh. Yunus dan Ibu Hermawati. Penulis adalah anak pertama dari 2 orang adik yang bernama Asma Dwi Putri dan Muh. Ikhsan Ramadhan. Penulis saat ini bertempat tinggal di Jalan Poros Barombong, tepatnya di desa Bontopajja di rumah Hj. Nuriah. Memulai pendidikan dari Taman Kanak-kanak di TK As'adiyah Lapai Kecamatan Ngapa Kabupaten Kolut, SDN 2 Lapai selama 5 tahun dan melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SD 2 Olo-oloho hingga tamat, PONPES SMP DDI AD Mangkoso Barru, MA Pi Bulu Lampang Pondok Pesanten DDI AD Mangkoso barru selama kurang lebih 2 tahun 3 bulan, dan hijrah ke MAN 1 Makassar. Kemudian melanjutkan kuliah pada jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis bercita-cita menjadi seorang penegak hukum yang berkelas, beretika, bijaksana yang paham dan hafal Qur'an 30 Juz. Dalam hal Organisasi penulis pernah menjadi ketua Organisasi Santri Kampus Satu (OSKS) Ponpes DDI AD Mangkoso Barru, ketua SPS (Siswa Pencinta Sains), Sekretaris II HMJ Peradilan, Anggota Bidang Pengembangan Bakat dan Minat IPPS (Ikatan Penggiat Peradilan Semu), Sekretaris FOSMADIM (Forum Silaturahmi Mahasiswa Alumni DDI Mangkoso), Volunteer Bangku Pelosok Volunteer Sobat Lemina, dan Anggota TAUSIT.